

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2021 MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Oleh:

**YAKUB KUNCARA
NPM: 1851010376**

Program Studi: Ekonomi Syariah

**Dosen Pembimbing I: Mardhiyah Hayati , S.P., M.S.I
Dosen Pembimbing II: Siska Yuli Anita, M.M**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, persentase pertumbuhan output haruslah lebih tinggi dari pada persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menjadi satu dari 20 Pemerintah Daerah se-Indonesia dengan katagori Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mandiri. ingkat Kemandirian Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi lampung Tahun 2017-2021? Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi lampung Tahun 2017-2021? Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi lampung Tahun 2017-2021? Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi lampung Tahun 2017-2021 Menurut Perspektif Ekonomi Islam ?. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari website Resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, yaitu data Pendapatan Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan (Uji F) pendapatan asli daerah, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota provinsi lampung tahun 2017-2021. Secara parsial (Uji T) variabel pendapatan

asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota provinsi lampung. Variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota provinsi lampung. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi atau R Square sebesar 0,149683 atau 14,96%. Sehingga melalui uji tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dapat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dalam perspektif ekonomi islam mengenai pertumbuhan ekonomi yang terjadi di provinsi lampung, maka pemerintah daerah kabupaten dan kota lah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Ekonomi Islam



ABSTRACT

Economic growth is a process of increasing per capita output in the long run, the percentage of output growth must be higher than the percentage of population growth and there is a long term tendency that this growth will continue. The Lampung Provincial Government (Pemprov) is one of 20 local governments in Indonesia with an independent Regional Expenditure Budget (APBD) category. Regency/City Government Independence level is the level of district/city government financial independence based on the ratio of Local Own Revenue (PAD) to APBD. The formulation of the problem in this research is Does Regional Original Income (PAD) Affect the Economic Growth of Lampung Province in 2017-2021? Does the Open Unemployment Rate (TPT) Affect the Economic Growth of Lampung Province in 2017-2021? What is the Effect of Regional Original Income (PAD) and Open Unemployment Rate (TPT) on the Economic Growth of Lampung Province in 2017-2021? What is the Effect of Regional Original Income (PAD) and Open Unemployment Rate (TPT) on the Economic Growth of Lampung Province in 2017-2021 According to the Islamic Economic Perspective?. The aim of this research is to find out local original income (PAD) and open unemployment rate (TPT) on economic growth in an Islamic economic perspective.

The method used in this study is a quantitative method using secondary data from the Official website of the Central Bureau of Statistics for Lampung Province, namely Regional Income Data, Open Unemployment Rate and GRDP Per Capita at Constant Prices for 2017-2021.

The results of the study show that simultaneously (Test F) regional original income, the open unemployment rate affects economic growth in districts and cities of Lampung province in 2017-2021. Partially (T-Test) the regional original income variable influences the economic growth of the districts and cities of Lampung province. The open unemployment rate variable has no significant effect on economic growth in the districts and cities of Lampung

province. Based on the test results of the coefficient of determination or R Square of 0.149683 or 14.96%. So that through this test it can be concluded that economic growth can be influenced by regional original income (PAD) and the open unemployment rate (TPT). In an Islamic economic perspective regarding economic growth that occurred in Lampung province, it is the district and city regional governments that are responsible for increasing economic growth in their respective regions.

Keywords: Regional Original Income, Open Unemployment Rate, Economic Growth, Islamic Economics





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yakub Kuncara
NPM : 1851010376
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan kota Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 Menurut Perspektif Ekonomi Islam”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat diimaklumi.

Bandar Lampung, 24 januari 2023

Penulis



Yakub Kuncara
NPM. 1851010376



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

SURAT PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 Menurut Perspektif Ekonomi Islam
Nama : Yakub Kuncara
NPM : 1851010376
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Mardiyah Hayati, S.P., M.S.I
NIP. 197605292008012010


Siska Yuli Anita, M.M
NIP. 199109012019032036

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP.198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 Menurut Perspektif Ekonomi Islam” disusun oleh Yakub Kuncara NPM. 1851010376 Program Studi Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jumat, 24 Februari 2023

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E. 

Sekretaris : Zathu Restie Utamie, M.Pd. 

Penguji I : M. Yusuf Bahtiar, M.E. 

Penguji II : Siska Yuli Anita, M.M. 

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Agus Supriyanto, M.M., C.A., Akt

262008011008



MOTTO

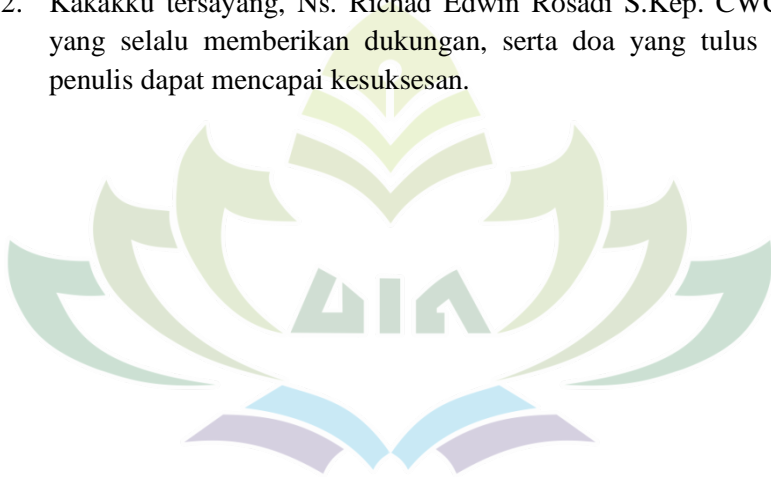
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,
“Aku hendak menjadikan khalifah 13) di bumi.” Mereka berkata,
“Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan
menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih
memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman,
“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang
tidak kamu ketahui.”
(Q.S. Al-Baqarah: 30)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah-Nya serta kesabaran dan kekuatan kepada penulis, tak lupa pula sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh syukur, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh rasa cinta dan kasih, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

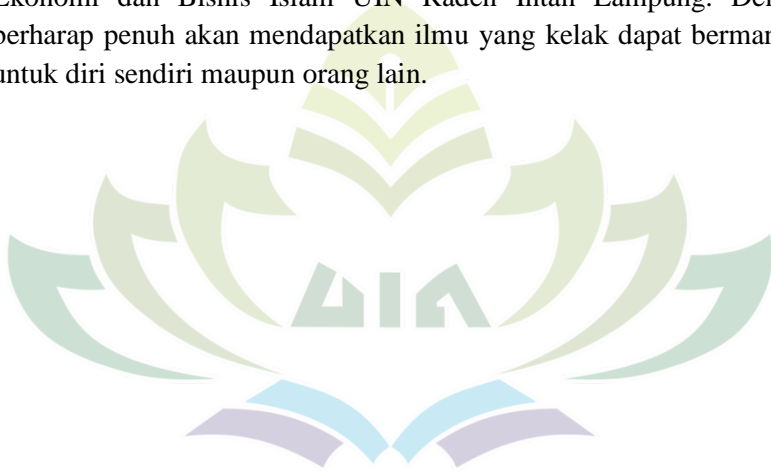
1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan banggakan Bapak Drs. Suroso dan ibu Susmiyati yang selalu memberikan do'a yang tulus dan ikhlas serta memberikan banyak dukungan serta motivasinya sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya.
2. Kakakku tersayang, Ns. Richad Edwin Rosadi S.Kep. CWCCA yang selalu memberikan dukungan, serta doa yang tulus agar penulis dapat mencapai kesuksesan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Yakub Kuncara dilahirkan Kotabumi, Lampung Utara pada tanggal 17 September 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Suroso dan Ibu Susmiyati. Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu:

Pendidikan pertama dimulai di SDN 02 Ogan Lima dan lulus pada tahun 2012, kemudian dilanjutkan di SMPN 1 Abung Barat dan lulus pada tahun 2015, selanjutnya di SMAN 1 Abung Barat dan lulus pada tahun 2018, Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan Prodi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Dengan berharap penuh akan mendapatkan ilmu yang kelak dapat bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim..

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 Menurut Perspektif Ekonomi Islam”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Starta Satu (S1) jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Ekonomi Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih ini disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., C.A, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah, serta Bapak Muhammad Kurniawan, M.E.Sy selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Ibu Mardiyah Hayati, S.P., M.S.I selaku Pembimbing Akademik I yang telah menyediakan waktu dan dengan sabar membantu memberikan masukan-masukan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Siska Yuli Anita, M.M selaku Pembimbing Akademik II yang telah membimbing penulis dengan ketelatenan dan kesabaran serta memberikan motivasi dan saran-saran yang membantu dalam terselesaikannya skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan

pengetahuan yang sangat bermanfaat dan segenap bantuan selama menyelesaikan studi.

6. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang telah membantu dalam menyediakan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Sahabat-sahabat penulis, Agus Salim, Wahyu Rhenaldy, Kamal Idris, Dion Saputra, Rizky Fadjar Pakaya, dan Dewi Wulandari yang selalu membantu, menemani, mendukung dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan khususnya seluruh anggota kelas F Ekonomi Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu bersama dalam proses belajar, berjuang selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini serta menjadi wadah keluh kesah dan canda tawa sejak tahun 2018.
9. Semua pihak yang penulis tidak dapat cantumkan satu persatu namun penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap sekiranya para pembaca dapat memberikan kritik dan saran bagi penulis. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca serta dapat menjadi sumbangsih dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan Ekonomi Islam. Dengan mengucapkan banyak terima kasih, semoga jasa-jasa seluruh pihak yang telah membantu serta mendoakan penulis hingga skripsi ini terselesaikan, mendapatkan balasan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin...

Bandar Lampung, 26 Januari 2023
Penulis

Yakub Kuncara
NPM. 1851010376

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
SURAT PERSETUJUAN	vii
SURAT PENGESAHAN.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	15
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	16
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	
A. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	31
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	31
2. Faktor-Faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	33
3. Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Islam	41
B. Konsep Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	45

1. Pengertian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)...	45
2. Faktor-Faktor Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	48
3. Jenis Jenis Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)...	49
4. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	50
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Perspektif islam.....	51
C. Pertumbuhan Ekonomi.....	54
1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	54
2. Teori Pertumbuhan.....	59
3. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi	62
4. Indikator Pertumbuhan Ekonomi	67
5. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Perspektif Ekonomi Islam.....	68
D. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	81
E. Kerangka Pemikiran.....	88
F. Pengajuan Hipotesis	89

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian	93
B. Jenis dan Sifat Penelitian	93
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data	94
1. Populasi	94
2. Sampel	94
3. Teknik Pengumpulan Data.....	95
D. Definisi Operasional Variabel	96
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	99
F. Uji Hipotesis	107

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	109
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1)	109
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X2)	111
3. Pertumbuhan Ekonomi (Y)	112
B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis	114

1. Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	114
a. Uji Chow.....	114
b. Uji Hausman	115
c. Uji Lagrange Multiplier (LM).....	116
2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda	117
3. Hasil Uji Hipotesis	119
a. Uji t (Uji Parsial).....	119
b. Uji F (Simultan).....	121
c. Koefisien Determinasi (R ²)	123
C. Hasil dan Pembahasan	125
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi diKabupaten dan kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2017-2021.....	125
2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi diKabupaten dan kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2017-2021.....	127
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan kota di Provinsi Lampung tahun 2017-2021	129
4. Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan kota di Provinsi Lampung tahun 2017-2021 Dalam Perspektif Ekonomi Islam	130

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	137
B. Rekomendasi.....	139

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	16
Tabel 3. 1	Definisi Operasional Variabel.....	97
Tabel 4. 1	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan kota di Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 (dalam miliar rupiah).....	110
Tabel 4. 2	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan kota di Provinsi Lampung tahun 2017-2021	111
Tabel 4. 3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten dan kota di Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah).....	112
Tabel 4. 4	Hasil Uji Chow	114
Tabel 4. 5	Hasil Uji Hausman.....	115
Tabel 4. 6	Hasil Uji LM.....	116
Tabel 4. 7	Uji Regresi Linear Berganda.....	117
Tabel 4. 8	Uji t.....	120
Tabel 4. 9	Uji F.....	122
Tabel 4. 10	Uji Koefisien Determinasi.....	123



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	88
--------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021
- Lampiran 2 Data Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017-2021
- Lampiran 3 Data PDRB Kabupaten dan kota Provinsi Lampung Tahun 2017-2021
- Lampiran 4 Uji Chow
- Lampiran 5 Uji Hausman
- Lampiran 6 Uji Lagrange Multiplier (LM)
- Lampiran 7 Uji t
- Lampiran 8 Uji F
- Lampiran 9 Uji Koefisien Determinasi
- Lampiran 10 Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Langkah awal untuk memahami judul skripsi maka penulis merasa perlu menjelaskan kata perkata yang menjadi judul dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten dan kota Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**

1. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹
2. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Pengangguran terbuka adalah terciptanya pengangguran akibat dari lebih rendahnya penambahan lapangan kerja dibandingkan pertumbuhan tenaga kerja.²
3. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan suatu perekonomian pada tahun tertentu dibanding dengan tahun sebelumnya.³ Pertumbuhan adalah perubahan dalam jangka panjang secara perlahan sekaligus mantap dilihat dari kenaikan tabungan dan penduduk.⁴

¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (yogyakarta: Andi, 2002).

² J. I Made dan B. K. A. D. Putu, “Pengaruh investasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di provinsi bali,” *E-Jurnal EP Unud* 8, no. 9 (2019): 2072–2101.

³ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (jakarta: Prenadamedia Group, 2006).

⁴ M. L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2012).

4. Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-qur'an dan Sunnah.⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul Skripsi ini suatu penelitian untuk menganalisis bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan kota Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan dari tingkat pendapatan nasional yang terjadi di suatu negara dari tahun ketahun.⁶ Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan bagian terpenting dalam kebijakan ekonomi di negara maupun sistem ekonomi manapun. Secara menyeluruh, hal ini dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan membawa kepada peluang dan pemerataan ekonomi yang lebih besar.⁷ Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat.⁸ Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah menciptakan tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang setinggi - tingginya, dengan diikuti dengan pemberantasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan

⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

⁶ Dr. R. Agoes Kamaroellah dan Dr. Farahdilah Kutsiyah, *Isu-isu Strategi Makro Ekonomi* (Surabaya: CV Zifatama Jawara, 2018), 78.

⁷ Syed Nawab Haidar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 133.

⁸ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 9.

pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, perbaikan kondisi lingkungan hidup, dan pemerataan kesempatan, serta penyegaran kehidupan budaya.

Menurut Kuznets, Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu ditentukan oleh adanya kemajuan teknologi, instisusional, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Kuznets mengemukakan bahwa ada 6 karakteristik atau ciri yang menunjukkan bahwa ekonomi suatu negara mengalami pertumbuhan sebagai berikut:⁹

1. Tingginya tingkat pendapatan perkapita
2. Tingginya produktivitas tenaga kerja
3. Tingginya faktor transformasi struktur ekonomi
4. Tingginya faktor transformasi sosial ideologi
5. Kemampuan perekonomian untuk melakukan perluasan pasar
6. Adanya kesadaran, bahwa pertumbuhan ekonomi sifatnya terbatas

Dari ke-enam karakteristik itu, tingkat pendapatan perkapita merupakan salah satu acuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi diprovinsi lampung, tingkat pendapatan perkapita dapat tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Atas Dasar Harga Konstan.

Perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar wilayah akan membawa kita melihat suatu gambaran penting tentang apakah pada suatu wilayah sedang terjadi ketimpangan pembangunan atau sudah adanya pemerataan pembangunan. PDRB perkapita menjadi bahan penting dalam melihat proses konvergensi dan perekonomian antar wilayah yang terjadi. Hal ini menandakan bahwa suatu wilayah perekonomian antar wilayah yang berbeda

⁹ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga* (jakarta: Erlangga, 1994), 99.

memiliki kekuatan masing-masing dan memiliki interinsik yang berbeda dalam melakukan berbagai aktivitas tidak terkecuali dalam menggerakkan roda perekonomian pada tiap wilayah antar kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.¹⁰

Pembangunan wilayah yang terus berkelanjutan tidak terlepas dari pengukuran untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan salah satu indikator penting, jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Provinsi ini memiliki potensi perekonomian dalam bidang Pertanian dan perkebunan Pemerintah melakukan penambahan alokasi program/kegiatan bagi daerah penyangga ketahanan pangan Nasional.¹¹ Hal ini mengingat Provinsi Lampung yang juga merupakan penyangga ketahanan pangan nasional dan sebagai penghasil komoditas pertanian yang besar. Ini menandakan bahwa Provinsi Lampung antar wilayahnya menunjukkan suatu potensi perekonomian khususnya bidang Pertanian dan perkebunan.¹²

Pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di provinsi lampung yang masih kurang berhasil dalam pelaksanaannya, terutama setelah melihat realisasi APBD Provinsi Lampung. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi diindonesia yang dapat disebut sebagai pintu gerbang pulau sumatera karena Lampung terletak dibagian barat daya pulau sumatera dengan posisi geografis yang menguntungkan. Letak provinsi lampung yang merupakan penghubung provinsi-provinsi yang ada

¹⁰ Ahmad Dhea Pratama, I Wayan Suparta, dan Arivina Ratih, "Bagaimanakah Perekonomian Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung, Konvergen Atau Divergen?," *jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/* 10, no. No 1 (2022): 67–80.

¹¹ BPS Kota Bandar Lampung, "*Bandar Lampung dalam Angka 2022*" (Bandar Lampung, 2022).

¹² Pratama, Suparta, dan Ratih, "Bagaimanakah Perekonomian Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung, Konvergen Atau Divergen?," 67–80.

disumatera dan jawa, seharusnya memberi keuntungan dan kelebihan bagi pemasukan daerah lampung sendiri.

Dilansir dari Sumatra.bisnis.com, Ekonomi Provinsi Lampung kuartal I/2021 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,10 persen dibandingkan dengan kuartal I/2020 (year-on-year/yoy), ungkap Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung. Catatan itu menunjukkan pelemahan dibandingkan dengan capaian kuartal I/2020 yang tumbuh 1,74 persen.

PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen pengeluaran yaitu Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, Ekspor Barang dan Jasa, dan Impor Barang dan Jasa.¹³

Sedangkan, PDRB menurut Lapangan Usaha merupakan total nilai tambah dari 17 sektor produksi yang ada di provinsi lampung, ke-17 sektor tersebut antara lain¹⁴ :

1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan
2. Pertambangan dan pengolahan
3. Industri pengolahan
4. Pengadaan listrik dan gas
5. Pengadaan air
6. Konstruksi
7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
8. Transportasi dan pergudangan
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum
10. Informasi dan komunikasi
11. Jasa keuangan
12. Real estate

¹³ BPS Kota Bandar Lampung, "Bandar Lampung dalam Angka 2022," 281.

¹⁴ *Ibid.*, 284–285.

13. Jasa perusahaan
14. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib
15. Jasa pendidikan
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
17. Jasa lainnya

Akibat pandemi covid-19 pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten dan kota provinsi lampung mengalami fluktuasi pada tiap-tiap kabupaten dan kota periode tahun 2017-2021. Dilansir dari lampungprov.go.id Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menjadi satu dari 20 Pemerintah Daerah se-Indonesia dengan kategori Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mandiri. Tingkat Kemandirian Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. Rinciannya Provinsi Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Batam, Bekasi, Tangerang, Semarang, Surabaya dan Badung. Saat ini yang dikatakan mandiri adalah yang PAD-nya lebih tinggi dari TKD

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Di era otonomi ini diharapkan daerah menjadi mandiri dalam pengelolaan kewenangannya. Hal ini ditandai dengan makin kuatnya Kapasitas Fiskal atau Pendapatan Asli Daerah serta Dana Bagi Hasil. Daerah yang mungkin masih kekurangan dana diberi bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Akan tetapi tujuan pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang kuat dalam menciptakan kemandirian daerah.

Persoalan kemandirian keuangan pemerintah daerah ini menjadi tantangan yang tidak ringan bagi daerah disebabkan oleh masalah makin membengkaknya biaya yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk pelayanan publik (*fiscal need*), sementara laju pertumbuhan penerimaan daerah (*fiscal capacity*) tidak mencukupi. Oleh karena itu pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat. Peningkatan kapasitas fiskal daerah ini pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang merupakan indikator bagi pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah itu sendiri. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut berupa: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Koswara bahwa daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus dapat diminimalisir, sehingga PAD harus menjadi 3 bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara kesatuan.¹⁵

PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi daerah merupakan isyarat yang menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan dan

kemandirian daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dalam hubungan ini Santoso mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.¹⁶

Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Saragih, 2003). Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Dengan adanya penerimaan dari PAD dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah dan akan berdampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi nasional. Peningkatan PAD dapat meningkatkan investasi pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.¹⁷

Sidik menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.¹⁸

Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD

¹⁶ Brotodihardjo dan R.Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: PT. Eresco, 1995).

¹⁷ Rori Chindy Febry, Antonius Luntungan Y, dan Audie Niode O, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 02 (2016): 249.

¹⁸ *Ibid.*

jugadapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi.¹⁹

Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, atas dasar tersebut maka kemandirian daerah dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan Asli Daerahnya, sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah di daerah maka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.²⁰

Pemerintah menyadari bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan bagian yang turut menentukan suksesnya pembangunan yang dilaksanakan maka pemerintah mengusahakan agar tidak terjadi lagi penurunan atau minimal mempertahankan nilai yang dicapai sebelumnya dengan jalan peningkatan pengawasan yang intensif dari petugas/aparat yang bersangkutan serta memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya Pendapatan Asli Daerah tersebut dalam menunjang pembangunan Daerah.

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ M. Zahari MS, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jambi," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 15, no. 4 (2015): 178.

tetapi belum dapat memperolehnya.²¹ Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh tidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.²²

Pengangguran diartikan sebagai seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Banyaknya pengangguran di suatu wilayah merupakan masalah yang tidak hanya mencakup bidang perekonomian saja. Di sisi lain, masalah pengangguran juga mempunyai hubungan erat dengan bidang sosial dan pendidikan. Di zaman seperti sekarang bukan hanya masyarakat yang memiliki pendidikan rendah saja yang menganggur, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi pula juga banyak yang menganggur.²³

Menurut Sukirno sebab terjadinya pengangguran dapat digolongkan kepada tiga jenis yaitu :²⁴

1. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang wujud apabila ekonomi telah mencapai kesempatan kerja penuh.
2. Pengangguran struktural, terjadi karena adanya perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian.

²¹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

²² BPS Provinsi Lampung, “*Bandar Lampung dalam Angka 2022*.”

²³ Sadono Sukirno, *Ekonomi pembangunan* (Jakarta: Bima Grafika, 2008).

²⁴ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

3. Pengangguran teknologi, ditimbulkan oleh adanya pengantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia yang disebabkan perkembangan teknologi.

Pengangguran terbuka selalu menjadi masalah di daerah maupun di negara, jumlah penduduk yang besar berimplikasi pada jumlah angkatan kerja yang juga besar. Jumlah pengangguran besar apabila negara maupun daerah tersebut tidak menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Persoalan pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah di tingkat nasional tetapi juga pemerintah di tingkat daerah. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menekan angka pengangguran di daerah mereka masing-masing. Namun kenyataannya, masih banyak pengangguran pada kabupaten dan kota provinsi lampung. Menurut data BPS, kabupaten dan kota yang paling tinggi tingkat pengangguran terbuka ada pada kota Bandar Lampung pada tahun 2021 dengan persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,85%. Pada tahun 2017-2019 sempat turun dan kembali naik lagi pada tahun 2020-2021 dikarenakan pandemi covid-19 dan mengakibatkan para pekerja yang di PHK dan ada juga sebagian karyawan dan pekerja yang kerja dirumah atau biasa disebut WFH (*Work From Home*).

Pengangguran (*unemployment*) merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara-negara sedang berkembang (*developing countries*), akan tetapi juga oleh negara-negara yang sudah maju (*developed countries*). Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labe force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan.²⁵

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan

²⁵ Nanga Muana, *Makro Ekonomi: teori, masalah dan kebijakan.*, Edisi Revisi (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 253.

manusia.²⁶ Perbedaan mendasar dari pertumbuhan ekonomi konvensional dan pertumbuhan ekonomi islam yaitu terletak pada tujuan akhir dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi konvensional hanya berorientasi pada pertumbuhan yang tinggi dari suatu aktifitas kehidupan ekonomi, tanpa menyertai dengan kontribusi yang merata dari output yang dihasilkan yang ujung-ujungnya berakhir pada kesejahteraan materi yang pendistribusiannya tidak merata untuk kesejahteraan manusia. Sedangkan ilmu ekonomi islam memandang pertumbuhan sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia tanpa memandang ras, agama dan bangsa. Lebih dari itu ilmu ekonomi mempunyai orientasi ganda dalam hal ekonomi yaitu kesejahteraan materi (duniawi) dan kepuasan batin (ukhrawi).²⁷

Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset kejurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya, ada sebuah hadist yang mengatakan “kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran.

Namun kenyataannya, tingkat pengangguran di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim relatif tinggi. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang buruknya pengangguran, baik individu, masyarakat ataupun negara, akan meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih serius. Walaupun Allah telah berjanji akan menanggung rizki kita semua, namun hal itu bukan berarti tanpa ada persyaratan yang perlu untuk dipenuhi. Syarat yang paling utama adalah kita harus berusaha untuk mencari rizki yang dijanjikan itu, karena Allah SWT telah menciptakan “sistem” yaitu siapa yang bekerja maka dialah yang akan mendapatkan rizki dan barang siapa yang berpangku tangan maka dia akan

²⁶ Abul Hasan Muhammad Sadeq, *Economic Development in Islam* (Malaysia: Pelanduk Publication, 1991), 5–6.

²⁷ Zainal Abidin, “Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi: Telaah Atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam Atas Sistem Ekonomi Konvensional,” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 7 (2012): 176.

kehilangan rizki. Artinya, ada suatu proses yang harus dilalui untuk mendapatkan rizki tersebut

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memiliki ketertarikan untuk menganalisis lebih lanjut terkait Analisis Pengaruh Pendapatan Nasional, Lapangan Kerja, dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi Lampung Di Era Covid-19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam dan mendeskripsikan pandangan ekonomi Islam terhadap pembangunan ekonomi tersebut dengan mengangkat judul penelitian: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi latar belakang diatas terkait analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi lampung tahun 2017-2021 menurut perspektif ekonomi islam terdapat :

- a. Beberapa Data Pendapatan Asli Daerah Yang Terealisasi Sudah Melewati Dari Target Tahun 2017-2021.
- b. Terjadi Penurunan Jumlah tingkat Pengangguran terbuka Dalam Kurun Waktu 2017-2019 tetapi terjadi peningkatan jumlah pengangguran dalam kurun waktu 2020-2021.
- c. Telah Terjadinya Penurunan Pada Pertumbuhan Ekonomi Di kabupaten dan kota Provinsi lampung Dalam Kurun Waktu 2019-2020.

2. Batasan masalah

Mengingat luasnya pembahasan dan menghindari kekeliruan peneliti maka perlu adanya pembatasan masalah.

- a. Penelitian ini membahas pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan bagaimana perspektif ekonomi islamnya.
- b. Penelitian ini membahas pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi dan bagaimana perspektif ekonomi islamnya.
- c. Objek penelitian ini adalah kabupaten dan kota Provinsi lampung dan data yang digunakan pada periode tahun 2017-2021.

Berdasarkan hasil identifikasi latar belakang diatas terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Provinsi lampung Tahun 2017-2021 Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Terdapat Kenaikan Jumlah Kemiskinan di Provinsi lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi lampung Tahun 2017-2021 ?
2. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi lampung Tahun 2017-2021 ?
3. Apakah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung Tahun 2017-2021?

4. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 Menurut Perspektif Ekonomi Islam ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang sudah diuraikan diatas, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung.
3. Untuk Mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung.
4. Untuk Mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukann maka diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan:
 - a. Bagi akademisi, memberikan ide dan tambahan pengetahuan dalam bidang ekonomi. Tentang analisis pendapatan asli daerah dan pengangguran Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi dalam perspektif ekonomi syariah.

- b. Bagi penulis, memberikan dan menambah wawasan mengenai analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam perspektif ekonomi syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan:
 - a. Bagi pemerintah, dapat digunakan sebagai gambaran tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang ada di Provinsi Lampung dan sebagai acuan untuk membuat kebijakan mengenai masalah pertumbuhan ekonomi ini.
 - b. Bagi masyarakat, agar menjadi wawasan guna menjadi pertimbangan dalam melihat pengaruh sektor pendapatan asli daerah dan pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 1. 1

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1	pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sulawesi utara (Christofel Alvonsus Supit Watulingas,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Artinya apabila pajak daerah naik maka pertumbuhan ekonomi akan naik <i>ceteris paribus</i> . Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi utara. Artinya apabila retribusi

	Paulus Kindangen, Daisy S.M. Engka)	naik maka pertumbuhan ekonomi akan turun <i>ceteris paribus</i> . Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Artinya apabila hasil kekayaan pengelolaan yang sah naik maka pertumbuhan ekonomi akan turun <i>ceteris paribus</i> .
2	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Tomohon (Olvy Beatriks Talangamin, Paulus Kindangen, Rosalina A.M. Koleangan)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3	Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten dan kota Jawa Timur	hasil dari penelitiannya adalah Terdapat Pengaruh Signifikan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Terdapat Pengaruh Signifikan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

	(Muhammad Yasin)	
4	Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali (Lily Kusumawati Dan I Gusti Bagus Wiksuana)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali.
5	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Periode 2012-2016)	Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa keseluruhan variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap nilai Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat tahun 2012-2016.
6	Pengaruh Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di	Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengangguran mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Padang Lawas Utara. Dari hasil uji t yang dilakukan, nilai yang dihasilkan 0,758

	Kabupaten Padang Lawas Utara Pada Tahun 2014-2019 (Nikmat Ritonga, Mariyatul Kubtiyah Dan Ritonga Abdi). ²⁸	(merujuk pada tabel hasil uji t) nilai tersebut diperkuat dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,468 lebih besar dari nilai probabilitas $\alpha = 0,05$ sehingga, pengangguran ditolak terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Padang Lawas Utara.
7	Pengaruh Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatra Selatan (Rahmat Imanto, Maya Panorama, dan Rinol Sumantri)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran dan kemiskinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Ini juga sesuai dengan hasil perhitungan menggunakan regresi sederhana, di mana tingkat signifikansi seluruh koefisien korelasi satu sisi yang diukur dengan probabilitas menghasilkan angka 0,019. Karena probabilitasnya kurang dari 0,05, korelasi antara variabel pengangguran dan kemiskinan (Variabel X1 dan X2) dan pertumbuhan ekonomi (Variabel Y) adalah signifikan.
8	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada satu dekade terakhir pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia belum konsisten tercapai setiap tahun. Hasil analisis regresi data time series menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Variabel pengeluaran pemerintah bidang

²⁸ Nikmat Ritonga, Mariyatul Kubtiyah, dan Ritonga Abdi Tanjung, "Pengaruh Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Padang Lawas Utara Pada Tahun 2014-2019," *Jurnal Misi Institut Pendidikan Tapanuli Selatan (IPTS)* 4, no. 3 (2021): 93-101.

	(Silvi Dewi Purwanti Farida Rahmawati)	pendidikan memiliki pengaruh yang berbanding terbalik terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Adapun upaya yang dapat dilakukan melalui implikasi kebijakan pemerintah yaitu penguatan Program Indonesia Pintar (PIP), hingga pendidikan vokasi, penguatan program kesehatan melalui penambahan fasilitas kesehatan, perekrutan tenaga medis, hingga memaksimalkan kartu Indonesia sehat dan BPJS.
9	Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo (Moh. Arif Novriansyah)	Hasil menunjukkan bahwa pengangguran dan kemiskinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Hal ini juga sesuai dengan hasil perhitungan menggunakan regresi sederhana, dimana tingkat signifikansi seluruh koefisien korelasi satu sisi sebagai diukur dengan probabilitas menghasilkan angka 0,019. Sejak probabilitas lebih kecil dari 0,05, korelasi antara variabel pengangguran dan kemiskinan (Variabel X1 dan X2) dan ekonomi pertumbuhan (Variabel Y) signifikan.
10	Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Indeks Pembangunan	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

	Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur (Alvy Kusumawati, Wiwin Priana Primandhana, Muhammad Wahed)	di Jawa Timur.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Sumber : Data diolah penulis, 2022

Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini adalah:

1. Christofel Alvonsus Supit Watulingas, Paulus Kindangen, Daisy S.M. Engka dengan judul “pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sulawesi utara”. metode analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Artinya apabila pajak daerah naik maka pertumbuhan ekonomi akan naik *ceteris paribus*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi utara. Artinya apabila retribusi naik maka pertumbuhan ekonomi akan turun *ceteris paribus*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Artinya apabila hasil kekayaan pengelolaan yang sah naik maka pertumbuhan ekonomi akan turun *ceteris paribus*.²⁹

²⁹ Christofel Alvonsus Supit Watulingas, Paulus Kindangen, dan Daisy S.M. Engka, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di

Perbedaannya: pada penelitian hanya terfokus meneliti 2 variabel dimana variabel x nya adalah PAD dan variabel y nya pertumbuhan ekonomi, dan memiliki perbedaan pada tempat penelitiannya. .

Persamaannya: ialah meneliti pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Olvy Beatriks Talangamin, Paulus Kindangen, Rosalina A.M. Koleangan dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Tomohon “. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.³⁰

Perbedaannya: pada penelitian ini hanya terfokus untuk meneliti pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dna alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi, dan juga memiliki perbedaan pada lokasi penelitian.

Persamaannya: pada penelitian ini ialah meneliti salah satu pengaruh variabel pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Muhammad Yasin dengan judul penelitian “Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten dan kota Jawa Timur”. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sampel penelitian ditentukan dengan Purposive random sampling, hasil dari penelitiannya adalah Terdapat Pengaruh Signifikan PAD

Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 19, no. 3 (2018): 104–17.

³⁰ Olvy Beatriks Talangamin, Paulus Kindangen, dan Rosalina A.M. Koleangan, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Tomohon,” *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 19, no. 7 (2018): 1–11.

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Terdapat Pengaruh Signifikan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.³¹

Perbedaannya: pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan berbeda pada lokasi penelitian.

Persamaannya: pada penelitian ini menganalisis pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Lily Kusumawati Dan I Gusti Bagus Wiksuana dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali”. Penelitian ini dilakukan di wilayah Sarbagita Provinsi Bali menggunakan metode sampling jenuh dalam penentuan sampel dengan populasi dan sampel adalah wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan pada tahun 2012 - 2016. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi nonpartisipan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali.³²

Perbedaannya: yaitu peneliti ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi, dan perbedaan pada tempat/lokasi penelitian.

Persamaannya: yaitu penelitian ini menganalisis pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

³¹ Yasin, “Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten dan kota Jawa Timur.”

³² Lily Kusumawati dan I Gusti Bagus Wiksuana, “Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali,” *E-Jurnal Manajemen Unud* 7, no. 5 (2018): 2592–2620.

5. Aries Suganda dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Periode 2012-2016)”. Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis jalur (path analysis), yang digunakan dalam menguji pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Analisis jalur adalah pengembangan dari analisis regresi linier berganda dengan penggunaan anak panah untuk menunjukkan hubungan antar variabel dalam analisis jalur. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan Metode observasi non partisipan merupakan metode yang dipilih dalam pengumpulan data yang dilakukan, yang terdiri dari: mempelajari, mencatat, mengamati uraian buku literatur, karya ilmiah berupa jurnal dan skripsi, artikel, serta dokumen – dokumen yang terdapat dari instansi terkait seperti BPS, Biro Keuangan, browsing mengenai Belanja, Pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil estimasi didapatkan hasil bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh negatif terhadap nilai Pertumbuhan Ekonomi, diperoleh hasil estimasi bahwa nilai Pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.³³

Perbedaannya: jenis penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan kuantitatif saja, dan perbedaan tempat/lokasi penelitian. **Persamaannya:** peneliti dan penulis menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan tingkat pengangguran terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi

6. Nikmat Ritonga, Mariyatul Kubtiyah Dan Ritonga Abdi dengan judul penelitian “Pengaruh Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Padang Lawas Utara Pada Tahun 2014-2019”. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah

³³ Aries Suganda, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi,” *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)* 7, no.1 (2019).

metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengangguran mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Padang Lawas Utara. Dari hasil uji t yang dilakukan, nilai yang dihasilkan 0,758 (merujuk pada tabel hasil uji t) nilai tersebut diperkuat dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,468 lebih besar dari nilai probabilitas $\alpha = 0,05$ sehingga, pengangguran ditolak terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Padang Lawas Utara.³⁴

Perbedaannya: yaitu pada metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. **Persamaannya:** pada penelitian ini meneliti pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi

7. Rahmat Imanto, Maya Panorama, dan Rinol Sumantri dengan judul penelitian “Pengaruh Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatra Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran dan kemiskinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Ini juga sesuai dengan hasil perhitungan menggunakan regresi sederhana, di mana tingkat signifikansi seluruh koefisien korelasi satu sisi yang diukur dengan probabilitas menghasilkan angka 0,019. Karena probabilitasnya kurang dari 0,05, korelasi antara variabel pengangguran dan kemiskinan (Variabel X1 dan X2) dan pertumbuhan ekonomi (Variabel Y) adalah signifikan.³⁵

Perbedaannya: penelitian ini menggunakan Metode analisis regresi sederhana, sedangkan penulis menggunakan analisis regresi linear berganda.

Persamaannya: adalah penulis dan peneliti adalah menganalisis salah satu variabel pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi.

³⁴ Ritonga, Kubtiyah, dan Tanjung, “Pengaruh Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Padang Lawas Utara Pada Tahun 2014-2019.”

³⁵ Rahmat Imanto, Maya Panorama, dan Rinol Sumantri, “Pengaruh Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatra Selatan,” *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 118–39.

8. Silvi Dewi Purwanti Farida Rahmawati dengan judul penelitian “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia”. Terdapat dua metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis model Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR) dan analisis regresi linier berganda dengan data time series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada satu dekade terakhir pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia belum konsisten tercapai setiap tahun. Hasil analisis regresi data time series menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh yang berbanding terbalik terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Adapun upaya yang dapat dilakukan melalui implikasi kebijakan pemerintah yaitu penguatan Program Indonesia Pintar (PIP), hingga pendidikan vokasi, penguatan program kesehatan melalui penambahan fasilitas kesehatan, perekrutan tenaga medis, hingga memaksimalkan kartu Indonesia sehat dan BPJS.³⁶

Perbedaannya: peneliti menggunakan model Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR), sedangkan penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kuantitatif, dan lokasi penelitian berbeda.

Persamaannya: yaitu menggunakan data time series dan menganalisis tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif

9. Moh. Arif Novriansyah dengan judul penelitian “Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo”. Hasil menunjukkan bahwa pengangguran

³⁶ Silvi Dewi Purwanti dan Farida Rahmawati, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia,” *Economics and Development Study, Faculty Of Economics and Business, Universitas Negeri Malang, Malang City, Indonesia* 4, no. 1 (2021): 32–44.

dan kemiskinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Hal ini juga sesuai dengan hasil perhitungan menggunakan regresi sederhana, dimana tingkat signifikansi seluruh koefisien korelasi satu sisi sebagai diukur dengan probabilitas menghasilkan angka 0,019. Sejak probabilitas lebih kecil dari 0,05, korelasi antara variabel pengangguran dan kemiskinan (Variabel X1 dan X2) dan ekonomi pertumbuhan (Variabel Y) signifikan.³⁷

Perbedaannya: yaitu peneliti menganalisis bagaimana pengaruh pengangguran dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan penulis menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi.

Persamaannya: ialah meneliti salah satu variabel pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi

10. Alvy Kusumawati, Wiwin Priana Primandhana, Muhammad Wahed dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur”. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur dengan per semester pada 2008-2019. Metode analitik yang digunakan adalah Multiple Linear Regression Analysis dengan menggunakan model Ordinary Least Square (OLS) dengan program SPSS (Statistic Program For Social Science) Versi 13.0 untuk menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Perbedaannya: peneliti menggunakan Metode analitik yang digunakan adalah Multiple Linear Regression Analysis dengan

³⁷ Moh. Arif Novriansyah, “Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo,” *Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo* 1, no. 1 (2018): 59–73.

menggunakan model Ordinary Least Square (OLS), sedangkan penulis memakai metode analisis data deskriptif kuantitatif.

Persamaannya: meneliti salah satu variabel yaitu tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi.³⁸

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika penulisan yang terbagi dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

Bab landasan teori dan pengujian hipotesis menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang menjelaskan tentang teori yang digunakan yakni teori tentang pendapatan asli daerah (PAD) dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga membahas mengenai hipotesis yang menjelaskan teori-teori yang menjelaskan teori – teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan dari penelitian terdahulu yang menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisa penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini berisi jenis dan sifat penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel,

³⁸ Alvy Kusumawati, Wiwin Priana Primandhana, dan Muhammad Wahed, “Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 2 (2021): 118–112.

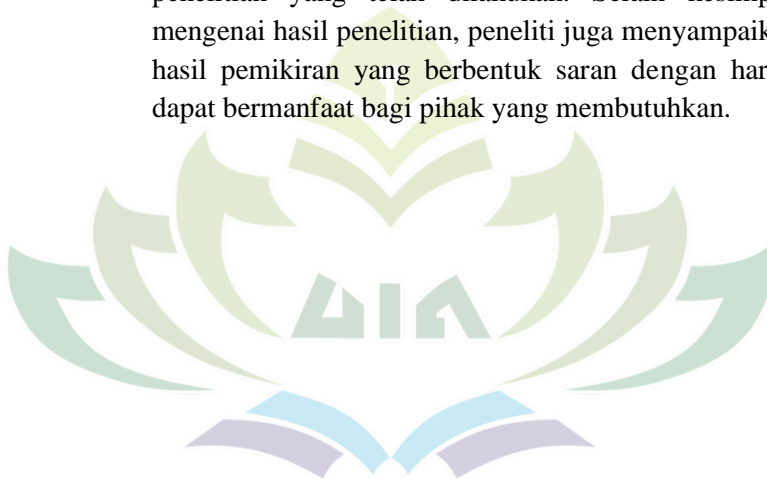
definisi operasional variabel metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan ini berisi analisis dari hasil pengolahan data, pembahasan hasil penelitian ini dan menjawab hipotesis yang telah dirumuskan serta menjelaskan hasil penelitian dalam perspektif ekonomi islam.

BAB V : PENUTUP

Bab penutupan ini berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Selain kesimpulan mengenai hasil penelitian, peneliti juga menyampaikan 4 hasil pemikiran yang berbentuk saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

setelah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dalam melakukan penelitian yang berjudul “analisis pendapatan asli daerah dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota provinsi lampung pada tahun 2017-2021. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai hubungan yang searah dengan pertumbuhan ekonomi. Apabila terjadi peningkatan pada pendapatan asli daerah maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami kenaikan.
2. tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota provinsi lampung tahun 2017-2021. Hal ini dapat dijelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka mempunyai hubungan yang searah dengan pertumbuhan ekonomi. apabila terjadi penurunan pada tingkat pengangguran terbuka maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Sesuai dengan teori menurut sukirno yang menyatakan bahwa akibat negatif dari pengangguran adalah menurunkan penghasilan penduduk, yang pada gilirannya menurunkan tingkat kesejahteraan yang di gapai seseorang. Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata.
3. Pendapatan asli daerah (PAD) dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2017-2021. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi atau *R Square* sebesar 0,149683 atau 14,96%. Sehingga melalui uji tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dapat dipengaruhi oleh Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 14,96% sedangkan sisanya 85,04% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian penelitian ini.

4. Dalam islam, Ekonomi islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut islam merupakan suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam islam adalah the process of alleviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life (Proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tatasusila dalam kehidupan). Maka pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material didunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral. Erat kaitanya dengan dengan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam, maka pemerintah daerah kabupaten dan kota lah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi didaerah masing-masing. Maka dari itu, pemerintah harus meningkatkan pendapatan daerah dan memastikan pendapatan tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti pembukaan lapangan kerja baru untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Negara Islam modern boleh memungut pajak kekayaan, pajak pendapatan, bea-cukai, pajak penjualan, pajak hadiah, pajak dari capital gain, pajak property, dan sebagainya. Muhammad Al-bahi, sebagaimana yang telah dikutip oleh mursi mengatakan bahwa ada tiga unsur penting untuk menciptakan kehidupan yang positif dan produktif, yaitu : Mendayagunakan seluruh potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita untuk bekerja,

melaksanakan gagasan dan produksi, Bertawakal kepada Allah berlindung dan meminta pertolongan kepada-Nya ketika melakukan suatu pekerjaan, Percaya kepada Allah bahwa Allah mampu menolak bahaya, dan kesombongan yang memasuki lapangan pekerjaan. Bermalasan atau menganggur akan memberikan dampak negatif langsung kepada pelakunya serta akan mendatangkan dampak tidak langsung terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan bidang pekerjaan yang harus dipilih, Islam mendorong umatnya untuk memproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuk seperti : pertanian, pengembalaan, berburu, industri, perdagangan dan lain-lain. Islam tidak semata-mata hanya memerintah untuk bekerja tetapi harus bekerja dengan lebih baik (insan), penuh ketekunan dan profesional.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah kabupaten dan kota provinsi lampung diharapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah karna merupakan salah satu modal keberhasilan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena Pendapatan Asli Daerah menentukan kapasitas daerah untuk menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Dengan mendorong PAD yang semakin tinggi dan besar terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan bahwa kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya sendiri.
2. Bagi pemerintah kabupaten dan kota provinsi lampung diharapkan untuk dapat mengatasi pengangguran dapat membantu permasalahan pengangguran dengan mengeluarkan kebijakan yang meminimalisir akan terjadinya pengangguran.

Seperti menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta pengembangan program transmigrasi.

3. Bagi pemerintah agar meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) agar pertumbuhan ekonomi semakin bertambah dan meningkat untuk bisa menjadi daerah yang mandiri dan bisa mengatur perekonomian rumah tangga daerahnya sendiri.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lebih diperhatikan lagi dan semoga bisa menggunakan prinsip-prinsip ekonomi islam. Supaya dalam pengaplikasian dapat menggunakan aspek-aspek keadilan dan kejujuran.



DAFTAR RUJUKAN

- Abul Hasan Muhammad Sadeq. *Economic Development in Islam*. Malaysia: Pelanduk Publication, 1991.
- Aries Suganda. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi.” *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)* 7, no. No.1 (2019).
- Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- . *Ekonomi Pembangunan Edisi Ketiga*. yogyakarta: STIE YKPN, 1997.
- Aryani, Dwi Septa, Yuni Rachmawati, dan Agung Anggoro Seto. *Ekonomi Syariah (Dengan Pendekatan Penelitian)*. Kuningan: Nusa Litera Inspirasi, 2019.
- Asfia Murni. *Ekonomika Makro*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Athaillah, Raja Masbar, dan Abubakar Hamzah. “Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi aceh.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 1 (2013): 3.
- Basuki, Agus Tri, dan Nano Prawoto. *Analisis regresi dalam penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi dengan Aplikasi SPSS & Eviews*. jakarta: Rajawali pers, 2016.
- BPS Kota Bandar Lampung. “*Bandar Lampung dalam Angka 2022*.” Bandar Lampung, 2022.
- Brotodihardjo, dan R.Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco, 1995.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. jakarta: Kencana, 2012.
- Devas, Nick. *Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia*. jakarta: UI-Pres, 1989.
- Dewi, Sita. “Pengangguran Terbuka : Kasus Di Indonesia.” *Jurnal*

Mitra Manajemen 9, no. 1 (2017): 43–46.

- Dr. R. Agoes Kamaroellah, dan Dr. Farahdilah Kutsiyah. *Isu-isu Strategi Makro Ekonomi*. Surabaya: CV Zifatama Jawara, 2018.
- Febry, Rori Chindy, Antonius Luntungan Y, dan Audie Niode O. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 02 (2016): 249.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23, Cet. VIII*. Semarang: Penerbit UNDIP, 2016.
- Gujarati, Damodar N, dan Dawn C. Porter. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.
- I Made, J., dan B. K. A. D. Putu. “Pengaruh investasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di provinsi Bali.” *E-Jurnal EP Unud* 8, no. 9 (2019): 2072–2101.
- Imanto, Rahmat, Maya Panorama, dan Rinol Sumantri. “Pengaruh Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatra Selatan.” *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 118–39.
- Indonesia, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII dan Bank. *Ekonomi Islam*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Jaya, Gde Bhaskara Perwira, dan A.A Bagus Putu Widanta. “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar.” *E-Jurnal EP Unud* 3, no. 5 (2014): 201–8.
- Koswara. *Otonomi dan Pajak Daerah*. Jogjakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007.
- Kurniawan, Robert. *Analisis Regresi: Dasar Dan Penerapannya*

Dengan R. 1st ed. jakarta: Kencana, 2016.

- Kusumawati, Alvy, Wiwin Priana Primandhana, dan Muhammad Wahed. “Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 2 (2021): 118–112.
- Kusumawati, Lily, dan I Gusti Bagus Wiksuana. “Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali.” *E-Jurnal Manajemen Unud* 7, no. 5 (2018): 2592–2620.
- M. L. Jhingan. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Mangkoesebroto, Guritno. *Ekonomi Publik*. Edisi 3. yogyakarta: BPFE, 1998.
- Mankiw. *Makroekonomi Edisi ke Enam*. jakarta: Erlangga, 2000.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. yogyakarta: Andi, 2002.
- Mohammad Rifqi Muslim. “Pengangguran Terbuka Dan Determinannya.” *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* Volume 15, no. No 2 (2014): 171.
- MS, M. Zahari. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jambi.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 15, no. 4 (2015): 170–81.
- Muana, Nanga. *Makro Ekonomi: teori, masalah dan kebijakan, Edisi Revisi*. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. jakarta: Raja Wali Pers, 2007.
- Murwaningsari, Etty. “Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum.” *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN* 11, no. 1 (2009): 30–41.
- Musbitah, Siti Ita Khaerul. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Tangerang Selatan Tahun 2011-2013.” *UIN SMH Banten*, n.d., 41.

- Muttaqin, Rizal. "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1 (2018): 121.
- Naf'an. *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Islamica* 6 (2012): 318.
- Novriansyah, Moh. Arif. "Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo." *Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo* 1, no. 1 (2018): 59–73.
- Prasetyo, Aris Adi, Virgiana Nugransih Siwi, dan Eranus Yoga Kudhani. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018." *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat* 1, no. 1 (2022): 37–56.
- Pratama, Ahmad Dhea, I Wayan Suparta, dan Arivina Ratih. "Bagaimanakah Perekonomian Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung, Konvergen Atau Divergen?" *jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/* 10, no. No 1 (2022): 67–80.
- Purwanti, Silvi Dewi, dan Farida Rahmawati. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia." *Economics and Development Study, Faculty Of Economics and Business, Universitas Negeri Malang, Malang City, Indonesia* 4, no. 1 (2021): 32–44.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rahman. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Jeneponto (Perspektif Islam)*. UIN Makasar, 2016.

- Rasyid, Abdurrahman. "Analisis Potensi Sektor potensi pertanian dikabupaten Kediri tahun 2010-2014." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 14 (2016): 3.
- Ritonga, dan Yoga Firdaus. *Ekonomi SMA Edisi Kedua*. jakarta: Phibeta, 2007.
- Ritonga, Nikmat, Mariyatul Kubtiyah, dan Ritonga Abdi Tanjung. "Pengaruh Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Padang Lawas Utara Pada Tahun 2014-2019." *Jurnal Misi Institut Pendidikan Tapanuli Selatan (IPTS)* 4, no. 3 (2021): 93–101.
- Rudy Badrudin. *Ekonomi Otonomi Daerah*. yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- Rustiono, Deddy. *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah*, 2008. Universitas Diponegoro, 2008.
- Sadono Sukirno. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- . *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Sadono, Sukirno. *Pengantar Ekonomi Makro*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R & D, Cetakan Ke- 20*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukirno, Sadono. *Ekonomi pembangunan*. jakarta: Bima Grafika, 2008.
- . *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- . *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo

- Persada, 2006.
- . *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- . *Teori Pengantar Makroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Susanto, Iwan. “Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998 – 2012).” *Jurnal iliah mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 2, no. 2 (2014).
- Syed Nawab Haidar Naqvi. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Talangamin, Olvy Beatriks, Paulus Kindangen, dan Rosalina A.M. Koleangan. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Tomohon.” *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 19, no. 7 (2018): 1–11.
- Tarigan, Robinson. *Ekonomi Regional; Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2014.
- Todaro, Michael P. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga, 1994.
- Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Watulingas, Christofel Alvonsus Supit, Paulus Kindangen, dan Daisy S.M. Engka. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 19, no. 3 (2018): 104–17.
- Wijaya, Tony. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis; Teori dan Praktik, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Yasin, Muhammad. “Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Jawa Timur.” *COSTING: Journal of Economic*,

Business and Accounting 3, no. 2 (2020): 465–72.

Zainal Abidin. “Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi: Telaah Atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam Atas Sistem Ekonomi Konvensional.” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 7 (2012): 176.





Lampiran 1 Data Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021 (dalam miliar rupiah)

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 069 095 669,90	1 124 189 349,90
PENDAPATAN ASLI DAERAH	82 125 266,37	50 471 541,00
Pajak Daerah	10 144 981,62	11 617 377,00
Retribusi Daerah	1 887 059,29	2 014 963,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 213 618,61	3 409 191,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	66 879 606,85	33 430 010,00
DANA PERIMBANGAN	773 064 817,36	854 830 511,90
Bagi Hasil Pajak	12 200 142,37	12 769 138,86
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 380 656,97	12 922 139,04
Dana Alokasi Umum (DAU)	519 160 196,00	521 743 958,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	224 323 822,02	307 395 276,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	213 905 586,18	218 887 297,00
Pendapatan Hibah	54 009 539,00	48 916 520,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	56 267 227,18	57 487 256,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	103 628 820,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	112 483 521,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 122 307 632,19	1 011 011 754,76
PENDAPATAN ASLI DAERAH	65 267 416,66	61 219 465,45
Pajak Daerah	13 376 645,93	11 794 800,88
Retribusi Daerah	2 227 953,29	3 018 063,77
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 431 364,50	4 809 979,70
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45 231 452,95	41 596 621,10
DANA PERIMBANGAN	791 712 917,26	707 243 876,70
Bagi Hasil Pajak	10 686 260,14	10 219 127,88
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 519 994,73	7 911 070,03
Dana Alokasi Umum (DAU)	543 777 950,00	497 587 974,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	231 728 712,39	191 525 704,79
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	265 327 298,26	242 548 412,60
Pendapatan Hibah	67 463 454,00	54 391 888,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	70 674 988,29	62 140 456,60
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	126 016 068,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	127 188 855,98	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2020 - 2021

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2020	2021
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 011 011 754,76	1 007 143 618,93
PENDAPATAN ASLI DAERAH	61 219 465,45	71 498 892,56
Pajak Daerah	11 794 800,88	13 052 711,73
Retribusi Daerah	3 018 063,77	3 516 611,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 809 979,70	5 923 153,84
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41 596 621,10	49 006 415,71
DANA PERIMBANGAN	707 243 876,70	686 801 246,40
Bagi Hasil Pajak	10 219 127,88	13 954 334,29
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 911 070,03	7 945 611,96
Dana Alokasi Umum (DAU)	497 587 974,00	491 712 483,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	191 525 704,79	173 188 817,15
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	242 548 412,60	248 843 479,97
Pendapatan Hibah	54 391 888,00	35 647 592,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	62 140 456,60	55 206 420,97
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	126 016 068,00	31 611 420,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	126 378 047,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 565 897 169,14	1 539 170 374,30
PENDAPATAN ASLI DAERAH	56 177 617,87	62 350 681,08
Pajak Daerah	16 846 967,78	17 664 599,87
Retribusi Daerah	1 163 556,12	1 180 916,15
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 718 487,86	3 883 833,52
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34 448 606,12	39 621 331,54
DANA PERIMBANGAN	1 130 001 624,79	1 073 484 123,68
Bagi Hasil Pajak	27 788 689,33	30 166 651,41
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	30 893 964,57	22 729 667,10
Dana Alokasi Umum (DAU)	775 574 559,00	778 605 786,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	295 744 411,89	241 982 019,17
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	379 717 926,48	403 335 569,54
Pendapatan Hibah	0,00	61 417 480,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	71 622 322,02	66 034 928,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	308 095 604,47	275 883 161,55

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 711 964 522,62	1 634 262 482,31
PENDAPATAN ASLI DAERAH	76 050 778,58	76 828 494,69
Pajak Daerah	20 571 076,17	22 111 991,79
Retribusi Daerah	1 536 190,32	2 157 871,70
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 283 144,63	4 454 087,95
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49 660 367,46	48 104 543,26
DANA PERIMBANGAN	1 131 249 311,79	1 080 168 166,69
Bagi Hasil Pajak	21 674 376,40	21 778 808,19
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	28 116 118,70	28 813 474,27
Dana Alokasi Umum (DAU)	802 326 253,00	718 696 624,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	279 132 563,69	310 879 260,24
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	504 664 432,25	477 265 820,92
Pendapatan Hibah	94 499 444,11	77 010 275,59
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	96 009 633,89	79 130 592,20
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	314 155 354,25	321 124 953,13

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2020 - 2021

Jenis Pendapatan	(000 Rp)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 634 262 482,31	1 652 125 879,04
PENDAPATAN ASLI DAERAH	76 828 494,69	95 786 639,30
Pajak Daerah	22 111 991,79	19 171 170,36
Retribusi Daerah	2 157 871,70	2 132 582,98
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 454 087,95	5 837 823,38
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48 104 543,26	68 645 062,58
DANA PERIMBANGAN	1 080 168 166,69	1 091 996 727,84
Bagi Hasil Pajak	21 778 808,19	60 656 934,25
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	28 813 474,27	33 208 901,48
Dana Alokasi Umum (DAU)	718 696 624,00	711 717 860,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	310 879 260,24	286 413 032,11
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	477 265 820,92	464 342 511,89
Pendapatan Hibah	77 010 275,59	21 140 556,88
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	79 130 592,20	72 373 886,43
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	290 259 750,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	321 124 953,13	80 568 318,58

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	2 075 494 140,05	2 077 357 073,14
PENDAPATAN ASLI DAERAH	206 061 231,20	215 475 629,19
Pajak Daerah	78 131 730,07	91 955 613,77
Retribusi Daerah	5 700 320,79	9 159 993,88
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 173 848,53	6 783 912,08
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	116 055 331,81	107 576 109,45
DANA PERIMBANGAN	1 286 922 564,04	1 407 454 514,65
Bagi Hasil Pajak	37 257 441,07	26 675 426,58
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	13 199 205,44
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 012 255 482,00	1 019 207 779,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	237 409 640,97	348 372 103,64
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	582 510 344,81	454 426 929,30
Pendapatan Hibah	99 359 488,60	99 837 587,01
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	98 774 749,63	93 389 454,90
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	384 376 106,59	35 000 000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1 000 000,00
Dana Desa	0,00	225 199 887,40
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
2019 - 2020**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	2 279 592 336,84	2 103 788 327,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	275 464 317,22	289 838 306,00
Pajak Daerah	117 851 364,60	140 287 776,00
Retribusi Daerah	10 242 771,76	24 741 974,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 927 461,63	8 600 000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	138 442 719,24	116 208 556,00
DANA PERIMBANGAN	1 412 941 259,23	1 314 761 598,00
Bagi Hasil Pajak	21 196 370,47	20 508 516,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6 181 821,09	4 166 081,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 054 042 773,00	979 091 229,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	331 520 294,67	310 995 772,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	591 186 760,39	499 188 423,00
Pendapatan Hibah	158 812 908,64	109 243 300,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	133 708 036,75	111 793 711,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	295 865 815,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2 800 000,00	0,00
Dana Desa	0,00	262 758 029,00
Lainnya	0,00	15 393 383,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
2020 - 2021**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2020	2021
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	2 103 788 327,00	2 076 591 333,96
PENDAPATAN ASLI DAERAH	289 838 306,00	295 717 851,54
Pajak Daerah	140 287 776,00	135 103 960,65
Retribusi Daerah	24 741 974,00	7 086 373,60
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 600 000,00	10 487 200,82
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	116 208 556,00	143 040 316,47
DANA PERIMBANGAN	1 314 761 598,00	1 293 421 880,92
Bagi Hasil Pajak	20 508 516,00	43 284 955,68
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4 166 081,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	979 091 229,00	947 733 529,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	310 995 772,00	302 403 396,24
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	499 188 423,00	487 451 601,50
Pendapatan Hibah	109 243 300,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	111 793 711,00	100 621 532,17
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	15 393 383,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	262 758 029,00	262 757 856,34
Lainnya	15 393 383,00	108 678 830,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2017-2018

Jenis Pendapatan	(000 Rp)	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	2 017 146 758,94	2 051 436 100,61
PENDAPATAN ASLI DAERAH	207 235 268,58	125 035 423,32
Pajak Daerah	39 718 721,29	53 213 791,41
Retribusi Daerah	5 058 720,70	5 715 507,22
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 282 977,08	2 739 592,25
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	160 174 849,51	63 366 532,44
DANA PERIMBANGAN	1 489 412 947,93	1 494 906 155,71
Bagi Hasil Pajak	82 280 387,54	24 368 533,38
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	45 372 438,25
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 062 555 526,00	1 069 168 109,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	344 577 034,39	355 997 075,08
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	320 498 542,44	431 494 521,59
Pendapatan Hibah	274 429,50	95 549 880,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	102 581 764,94	335 944 641,59
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	217 642 348,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
2019 - 2020**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	2 132 688 979,13	2 011 080 268,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	147 527 535,83	128 019 040,30
Pajak Daerah	62 332 058,17	60 205 717,89
Retribusi Daerah	3 925 575,23	3 318 908,07
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 176 760,33	3 460 827,02
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	78 093 142,10	61 033 587,31
DANA PERIMBANGAN	1 475 128 391,94	1 371 023 450,85
Bagi Hasil Pajak	17 012 037,83	28 380 820,81
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	26 029 815,37	16 687 322,62
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 106 577 701,00	1 007 072 973,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	325 508 837,75	318 882 334,42
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	510 033 051,36	512 037 776,85
Pendapatan Hibah	117 993 106,00	109 566 190,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	118 332 439,36	113 410 191,25
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	273 707 506,00	289 061 395,60
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2020

**Tabel 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
2020 - 2021**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2020	2021
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	2 011 080 268,00	2 098 231 321,15
PENDAPATAN ASLI DAERAH	128 019 040,30	158 362 920,30
Pajak Daerah	60 205 717,89	66 975 753,70
Retribusi Daerah	3 318 908,07	4 025 662,76
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 460 827,02	3 611 400,14
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	61 033 587,31	83 750 103,70
DANA PERIMBANGAN	1 371 023 450,85	1 425 922 933,36
Bagi Hasil Pajak	28 380 820,81	46 614 455,48
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	16 687 322,62	20 661 832,55
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 007 072 973,00	996 513 649,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	318 882 334,42	362 132 996,34
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	512 037 776,85	513 945 467,49
Pendapatan Hibah	109 566 190,00	104 577 918,40
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	113 410 191,25	97 019 317,09
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	289 061 395,60	31 277 579,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	281 070 653,00
Lainnya	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2021

Tabel 8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	2 349 373 634,77	2 622 912 022,87
PENDAPATAN ASLI DAERAH	147 048 201,16	179 370 202,74
Pajak Daerah	63 604 185,08	72 206 626,41
Retribusi Daerah	4 845 199,29	7 085 160,83
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 425 023,30	6 479 910,16
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	73 173 793,49	93 598 505,35
DANA PERIMBANGAN	1 722 465 741,92	1 847 859 041,00
Bagi Hasil Pajak	56 056 783,41	43 964 411,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	3 713 797,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 317 680 979,00	1 378 175 214,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	348 727 979,51	422 005 619,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	479 859 691,68	595 682 779,13
Pendapatan Hibah	886 018,88	154 411 949,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	109 070 447,81	132 171 085,13
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	241 434 963,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	128 468 262,00	309 099 745,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
2019 - 2020**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	2 588 849 568,44	2 086 453 717,58
PENDAPATAN ASLI DAERAH	193 634 175,31	179 883 067,93
Pajak Daerah	92 615 976,25	85 423 990,50
Retribusi Daerah	10 498 043,91	9 646 781,06
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 523 066,08	7 231 134,96
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	83 997 089,07	77 581 161,40
DANA PERIMBANGAN	1 797 258 034,50	1 625 918 929,77
Bagi Hasil Pajak	34 284 076,26	26 055 944,72
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 340 185,42	7 489 539,39
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 378 175 214,00	1 248 686 762,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	379 458 558,82	343 686 683,66
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	597 957 358,63	280 651 719,88
Pendapatan Hibah	143 726 782,70	164 969 440,98
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	145 048 226,26	115 682 278,91
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	309 099 744,99	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	310 176 977,00
Lainnya	82 604,68	76 467,24

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
2020 - 2021**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2020	2021
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	2 086 453 717,58	2 485 893 332,63
PENDAPATAN ASLI DAERAH	179 883 067,93	234 891 264,05
Pajak Daerah	85 423 990,50	100 691 283,46
Retribusi Daerah	9 646 781,06	8 075 809,38
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 231 134,96	7 711 541,56
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	77 581 161,40	118 412 629,65
DANA PERIMBANGAN	1 625 918 929,77	1 664 299 043,38
Bagi Hasil Pajak	26 055 944,72	50 048 560,15
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 489 539,39	23 231 397,14
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 248 686 762,00	1 233 414 075,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	343 686 683,66	357 605 011,10
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	280 651 719,88	586 703 025,20
Pendapatan Hibah	164 969 440,98	159 344 909,35
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	115 682 278,91	104 203 008,65
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	9 907 524,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	310 176 977,00	313 247 583,20
Lainnya	76 467,24	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 703 964 808,23	1 726 771 079,13
PENDAPATAN ASLI DAERAH	103 970 703,71	102 289 605,03
Pajak Daerah	22 572 848,96	24 074 684,98
Retribusi Daerah	1 922 881,42	1 904 993,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 372 873,37	8 977 378,48
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	72 102 099,96	67 332 548,29
DANA PERIMBANGAN	1 246 229 672,49	1 206 059 795,86
Bagi Hasil Pajak	37 548 261,41	16 353 712,24
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	13 671 168,50
Dana Alokasi Umum (DAU)	945 025 570,00	949 531 402,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	263 655 841,08	226 503 513,12
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	353 764 432,02	410 844 700,86
Pendapatan Hibah	71 251 400,00	70 557 920,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	84 991 975,59	332 709 803,48
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	195 028 192,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2 492 864,44	7 576 977,38

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 775 731 796,77	1 662 256 224,27
PENDAPATAN ASLI DAERAH	101 829 440,15	108 672 849,29
Pajak Daerah	25 519 982,72	25 268 406,16
Retribusi Daerah	2 232 602,63	1 889 950,47
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 743 429,75	9 378 587,98
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	65 333 425,05	72 135 904,68
DANA PERIMBANGAN	1 244 666 930,85	1 122 166 136,76
Bagi Hasil Pajak	13 101 497,62	16 752 561,15
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 257 973,42	7 488 826,21
Dana Alokasi Umum (DAU)	981 730 753,00	880 015 613,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	244 576 706,81	217 909 136,40
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	429 235 425,78	431 417 238,22
Pendapatan Hibah	81 212 520,00	82 670 861,32
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	98 943 320,98	92 439 261,62
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	248 160 049,00	256 307 115,29
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lainnya	919 535,80	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2020 - 2021

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2020	2021
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 662 256 224,27	1 601 821 682,76
PENDAPATAN ASLI DAERAH	108 672 849,29	104 328 396,79
Pajak Daerah	25 268 406,16	28 121 219,66
Retribusi Daerah	1 889 950,47	3 594 554,29
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9 378 587,98	10 372 487,93
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	72 135 904,68	62 240 134,91
DANA PERIMBANGAN	1 122 166 136,76	1 094 190 549,44
Bagi Hasil Pajak	16 752 561,15	25 878 400,58
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 488 826,21	7 498 436,30
Dana Alokasi Umum (DAU)	880 015 613,00	868 639 092,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	217 909 136,40	192 174 620,56
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	431 417 238,22	403 302 736,53
Pendapatan Hibah	82 670 861,32	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	92 439 261,62	81 802 510,66
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	256 307 115,29	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	245 652 207,88
Lainnya	0,00	75 848 018,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2021

Tabel 10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 340 655 509,81	1 385 711 569,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	49 551 283,41	56 764 977,00
Pajak Daerah	15 182 720,24	18 384 783,00
Retribusi Daerah	886 384,80	1 383 814,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 117 487,41	3 924 887,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30 364 690,95	33 071 493,00
DANA PERIMBANGAN	1 034 484 642,82	1 023 173 716,00
Bagi Hasil Pajak	36 780 923,13	16 489 467,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	13 724 219,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	650 838 237,00	655 518 878,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	346 865 482,69	337 441 152,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	256 619 583,59	305 772 876,00
Pendapatan Hibah	9 000 000,00	53 295 943,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	65 358 337,59	252 456 234,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	182 260 346,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	900,00	20 699,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 398 937 421,00	1 289 460 561,99
PENDAPATAN ASLI DAERAH	62 353 561,00	64 617 681,62
Pajak Daerah	19 861 797,00	16 543 967,96
Retribusi Daerah	1 830 633,00	1 434 965,55
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 626 354,00	4 204 876,08
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36 034 777,00	42 433 872,03
DANA PERIMBANGAN	990 355 064,00	883 983 659,21
Bagi Hasil Pajak	14 149 846,00	11 609 352,60
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6 074 100,00	7 727 450,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	681 902 953,00	621 970 133,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	288 228 165,00	242 676 723,61
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	346 228 796,00	340 859 221,16
Pendapatan Hibah	61 427 280,00	70 562 145,50
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	88 025 606,00	77 377 656,93
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	196 749 376,00	192 902 501,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lainnya	26 534,00	16 917,73

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2020 - 2021

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2020	2021
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 289 460 561,99	1 297 840 346,75
PENDAPATAN ASLI DAERAH	64 617 681,62	70 125 340,98
Pajak Daerah	16 543 967,96	19 111 291,35
Retribusi Daerah	1 434 965,55	1 829 577,72
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 204 876,08	4 786 101,94
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42 433 872,03	44 398 369,96
DANA PERIMBANGAN	883 983 659,21	899 917 820,59
Bagi Hasil Pajak	11 609 352,60	25 029 488,64
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 727 450,00	9 949 422,02
Dana Alokasi Umum (DAU)	621 970 133,00	615 994 048,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	242 676 723,61	248 944 861,94
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	340 859 221,16	327 797 185,18
Pendapatan Hibah	70 562 145,50	21 445,87
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	77 377 656,93	70 512 881,52
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	192 902 501,00	9 865 812,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	185 683 847,00
Lainnya	16 917,73	61 713 198,79

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 160 317 938,79	1 228 883 918,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	40 931 506,76	67 129 956,00
Pajak Daerah	20 788 976,11	19 836 334,00
Retribusi Daerah	1 628 987,03	1 530 350,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 047 289,32	3 078 120,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15 466 254,31	42 685 152,00
DANA PERIMBANGAN	825 407 650,78	903 489 250,00
Bagi Hasil Pajak	21 789 653,17	18 466 366,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	14 469 873,03	15 435 304,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	599 655 961,00	612 112 587,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	189 492 163,58	257 474 993,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	293 978 781,25	258 264 712,00
Pendapatan Hibah	0,00	44 718 589,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	121 733 355,28	213 546 123,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4 000 000,00	0,00
Dana Desa	0,00	127 242 125,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	168 245 425,97	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
2019 - 2020**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 188 271 650,00	1 148 268 456,16
PENDAPATAN ASLI DAERAH	82 379 613,00	89 767 355,40
Pajak Daerah	25 900 833,00	24 330 461,76
Retribusi Daerah	1 244 629,00	1 447 690,35
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 089 662,00	3 338 821,55
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52 144 489,00	60 650 381,74
DANA PERIMBANGAN	823 127 374,00	782 510 620,43
Bagi Hasil Pajak	17 904 922,00	15 927 661,02
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 709 085,00	7 566 205,65
Dana Alokasi Umum (DAU)	639 431 562,00	577 189 919,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	160 081 805,00	181 826 834,77
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	282 764 663,00	275 990 480,33
Pendapatan Hibah	49 725 305,00	55 723 486,80
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	92 247 064,00	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	68 893 100,53
Dana Desa	131 102 381,00	133 276 906,00
Lainnya	9 689 913,00	18 096 987,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
2020 - 2021**

	(000 Rp)	
Jenis Pendapatan	2020	2021
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 148 268 456,16	1 180 262 396,18
PENDAPATAN ASLI DAERAH	89 767 355,40	106 614 737,07
Pajak Daerah	24 330 461,76	29 511 434,50
Retribusi Daerah	1 447 690,35	1 586 730,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 338 821,55	4 258 697,04
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60 650 381,74	71 257 875,23
DANA PERIMBANGAN	782 510 620,43	779 733 467,69
Bagi Hasil Pajak	15 927 661,02	27 047 832,04
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 566 205,65	12 818 934,72
Dana Alokasi Umum (DAU)	577 189 919,00	570 870 961,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	181 826 834,77	168 995 739,93
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	275 990 480,33	293 914 191,42
Pendapatan Hibah	55 723 486,80	1 783 379,24
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	70 251 676,08
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	35 656 078,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	68 893 100,53	0,00
Dana Desa	133 276 906,00	135 370 514,00
Lainnya	18 096 987,00	50 852 544,11

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 12. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 328 402 245,76	1 285 923 925,08
PENDAPATAN ASLI DAERAH	50 150 346,62	58 265 161,93
Pajak Daerah	21 036 338,21	24 664 796,09
Retribusi Daerah	4 212 285,55	5 232 815,02
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	318 037,55	410 196,35
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24 583 685,32	27 957 354,47
DANA PERIMBANGAN	930 162 730,63	844 615 366,87
Bagi Hasil Pajak	28 115 458,96	12 595 358,06
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	13 389 806,65
Dana Alokasi Umum (DAU)	668 378 478,00	669 276 831,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	233 668 793,67	149 353 371,16
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	348 089 168,50	383 043 396,28
Pendapatan Hibah	63 576 390,00	48 058 854,37
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	61 132 280,05	233 139 684,77
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	223 380 498,45	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	101 844 857,13

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 12. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 279 708 279,53	1 275 131 350,81
PENDAPATAN ASLI DAERAH	65 808 842,72	72 158 809,48
Pajak Daerah	28 562 590,49	29 123 833,41
Retribusi Daerah	11 117 343,43	12 192 774,80
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	947 382,23	1 602 625,70
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25 181 526,57	29 239 575,56
DANA PERIMBANGAN	895 181 485,50	859 551 873,36
Bagi Hasil Pajak	9 143 665,61	12 610 672,90
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6 242 713,47	7 835 231,98
Dana Alokasi Umum (DAU)	684 210 957,00	619 834 916,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	195 584 149,42	219 271 052,49
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	318 717 951,31	343 420 667,97
Pendapatan Hibah	65 197 634,55	57 858 526,47
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	83 709 946,76	69 617 577,50
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	169 810 370,00	215 944 564,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 12. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2020 - 2021

Jenis Pendapatan	(000 Rp)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 275 131 350,81	1 236 502 482,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	72 158 809,48	81 674 501,00
Pajak Daerah	29 123 833,41	28 179 871,00
Retribusi Daerah	12 192 774,80	16 745 520,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 602 625,70	1 798 157,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29 239 575,56	34 950 953,00
DANA PERIMBANGAN	859 551 873,36	860 849 798,00
Bagi Hasil Pajak	12 610 672,90	19 385 413,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 835 231,98	8 220 959,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	619 834 916,00	611 838 446,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	219 271 052,49	221 404 980,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	343 420 667,97	293 978 183,00
Pendapatan Hibah	57 858 526,47	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	69 617 577,50	65 005 028,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	215 944 564,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	156 607 396,00
Lainnya	0,00	72 365 759,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 13. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 194 493 674,54	1 150 545 601,86
PENDAPATAN ASLI DAERAH	73 405 027,12	71 824 582,14
Pajak Daerah	17 935 953,76	21 289 348,70
Retribusi Daerah	2 845 430,51	3 327 703,41
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	836 477,51	1 660 233,85
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51 787 165,35	45 547 296,18
DANA PERIMBANGAN	860 970 139,91	842 346 040,38
Bagi Hasil Pajak	27 852 208,00	9 953 425,65
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	13 470 569,13
Dana Alokasi Umum (DAU)	621 967 450,00	621 967 450,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	211 150 481,00	196 954 595,59
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	260 118 507,51	236 374 979,34
Pendapatan Hibah	687 547,45	43 819 268,75
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	62 288 021,42	61 031 350,59
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53 167 797,00	26 250 000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	105 274 360,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	143 975 141,64	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 13. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 206 214 223,95	1 185 639 934,08
PENDAPATAN ASLI DAERAH	86 313 480,52	97 122 937,15
Pajak Daerah	23 521 005,22	30 877 603,10
Retribusi Daerah	3 441 509,87	3 448 446,20
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 785 492,33	2 315 375,44
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57 565 473,10	60 481 512,41
DANA PERIMBANGAN	859 198 408,36	777 649 665,72
Bagi Hasil Pajak	7 218 112,24	12 379 206,40
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 734 632,01	7 658 296,13
Dana Alokasi Umum (DAU)	639 677 501,00	579 016 439,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	206 568 163,11	178 595 724,19
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	260 702 335,07	310 867 331,21
Pendapatan Hibah	46 865 952,57	48 560 776,09
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	84 268 963,50	71 430 610,32
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	129 567 419,00	190 875 944,80
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 13. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2020 - 2021

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2020	2021
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 185 639 934,08	1 257 703 239,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	97 122 937,15	113 827 063,00
Pajak Daerah	30 877 603,10	34 190 911,00
Retribusi Daerah	3 448 446,20	4 536 377,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 315 375,44	3 146 160,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60 481 512,41	71 953 615,00
DANA PERIMBANGAN	777 649 665,72	889 488 352,00
Bagi Hasil Pajak	12 379 206,40	15 382 606,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 658 296,13	7 363 663,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	579 016 439,00	569 803 319,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	178 595 724,19	296 938 764,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	310 867 331,21	254 387 824,00
Pendapatan Hibah	48 560 776,09	46 495 104,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	71 430 610,32	63 005 010,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	190 875 944,80	16 789 915,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	128 097 795,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 14. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	729 684 071,89	966 621 241,77
PENDAPATAN ASLI DAERAH	22 114 016,97	32 767 743,90
Pajak Daerah	7 373 015,84	9 101 628,93
Retribusi Daerah	1 366 932,44	2 813 349,65
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 056 603,17	1 067 293,19
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12 317 465,52	19 785 472,13
DANA PERIMBANGAN	577 752 823,93	615 640 647,75
Bagi Hasil Pajak	17 608 516,75	16 787 209,61
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 168 527,59	13 436 651,52
Dana Alokasi Umum (DAU)	444 344 769,00	446 272 067,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	98 631 010,59	139 144 719,62
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	148 772 525,62	195 545 790,12
Pendapatan Hibah	9 500 000,00	24 402 320,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	48 171 044,31	48 476 410,12
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	87 417 060,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	91 101 481,31	35 250 000,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 14. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2019 - 2020

Jenis Pendapatan	(000 Rp)	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	858 292 112,73	817 634 010,62
PENDAPATAN ASLI DAERAH	39 595 944,11	50 558 310,56
Pajak Daerah	11 579 264,20	20 226 693,81
Retribusi Daerah	7 648 911,47	2 365 687,14
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 606 943,09	1 736 531,58
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18 760 825,35	26 229 398,03
DANA PERIMBANGAN	632 875 492,47	558 907 762,31
Bagi Hasil Pajak	15 815 944,04	12 338 637,14
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6 199 692,47	8 114 824,85
Dana Alokasi Umum (DAU)	455 225 458,00	407 710 506,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	155 634 397,96	130 743 794,32
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	185 820 676,15	208 167 937,75
Pendapatan Hibah	170 842,95	39 163 468,08
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	70 072 815,21	58 196 649,67
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	13 809 071,00	8 120 650,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	101 767 947,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	102 687 170,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 14. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2020 - 2021

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2020	2021
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	817 634 010,62	847 828 696,22
PENDAPATAN ASLI DAERAH	50 558 310,56	56 989 389,69
Pajak Daerah	20 226 693,81	22 175 679,08
Retribusi Daerah	2 365 687,14	1 676 923,84
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 736 531,58	2 001 780,46
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26 229 398,03	31 135 006,30
DANA PERIMBANGAN	558 907 762,31	601 761 209,61
Bagi Hasil Pajak	12 338 637,14	41 348 533,22
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8 114 824,85	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	407 710 506,00	403 336 470,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	130 743 794,32	157 076 206,39
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	208 167 937,75	189 078 096,92
Pendapatan Hibah	39 163 468,08	3 288 060,22
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	58 196 649,67	52 326 296,70
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8 120 650,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	103 961 138,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	102 687 170,00	29 502 602,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 15. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2017-2018**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	902 466 887,83	946 197 873,63
PENDAPATAN ASLI DAERAH	97 387 117,99	27 613 469,64
Pajak Daerah	10 351 676,92	14 020 637,89
Retribusi Daerah	1 970 729,20	2 906 222,11
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 558 804,22	1 632 351,65
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	83 505 907,65	9 054 257,98
DANA PERIMBANGAN	670 846 172,72	725 406 877,46
Bagi Hasil Pajak	22 467 717,31	11 797 096,29
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	14 124 870,96	12 876 195,83
Dana Alokasi Umum (DAU)	459 231 176,00	463 478 442,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	175 022 408,44	237 255 143,34
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	134 233 597,11	193 177 526,53
Pendapatan Hibah	0,00	34 002 020,30
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	44 138 406,35	79 775 225,31
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	74 708 156,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	90 095 190,76	4 692 124,92

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 15. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2019 - 2020**

Jenis Pendapatan	(000 Rp)	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	946 904 183,52	865 445 745,44
PENDAPATAN ASLI DAERAH	32 410 517,40	41 093 467,36
Pajak Daerah	14 996 362,60	18 903 586,92
Retribusi Daerah	3 228 954,10	4 760 043,40
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 358 292,77	2 499 398,81
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11 826 907,93	14 930 438,23
DANA PERIMBANGAN	661 079 127,84	631 141 021,98
Bagi Hasil Pajak	10 377 368,09	9 660 322,70
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 439 583,68	8 014 509,55
Dana Alokasi Umum (DAU)	488 530 984,00	441 732 032,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	156 731 192,07	164 079 498,74
Dana Insentif Daerah	0,00	7 654 659,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	253 414 538,27	193 211 256,10
Pendapatan Hibah	53 006 226,00	40 361 630,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	80 693 362,33	61 513 503,97
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	27 722 014,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	435 000,00	0,00
Dana Desa	89 161 665,00	90 895 123,00
Lainnya	2 396 270,94	440 999,13

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 15. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2020 - 2021**

Jenis Pendapatan	(000 Rp)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	857 791 086,44	879 766 152,58
PENDAPATAN ASLI DAERAH	41 093 467,36	46 579 011,60
Pajak Daerah	18 903 586,92	19 874 146,79
Retribusi Daerah	4 760 043,40	1 650 159,76
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 499 398,81	2 630 507,80
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14 930 438,23	22 424 197,25
DANA PERIMBANGAN	623 486 362,98	623 027 083,98
Bagi Hasil Pajak	9 660 322,70	20 584 458,79
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8 014 509,55	7 489 964,67
Dana Alokasi Umum (DAU)	441 732 032,00	436 265 639,07
Dana Alokasi Khusus (DAK)	164 079 498,74	158 687 021,45
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	193 211 256,10	210 160 057,00
Pendapatan Hibah	40 361 630,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	61 513 503,97	56 844 750,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	25 608 771,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	90 895 123,00	91 449 163,00
Lainnya	440 999,13	36 257 373,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 16. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	813 113 164,46	775 333 888,14
PENDAPATAN ASLI DAERAH	42 895 150,22	23 481 041,77
Pajak Daerah	5 101 054,61	6 415 256,31
Retribusi Daerah	2 499 888,78	2 880 782,31
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35 294 206,82	14 185 003,15
DANA PERIMBANGAN	596 175 229,65	573 283 931,03
Bagi Hasil Pajak	12 066 179,34	9 284 715,46
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	14 138 665,04	12 866 687,50
Dana Alokasi Umum (DAU)	410 991 252,00	417 316 170,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	191 580 410,20	133 816 358,06
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	141 441 507,66	178 568 915,34
Pendapatan Hibah	0,00	21 440 640,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	48 798 737,21	47 783 898,57
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	10 000 000,00
Dana Desa	0,00	98 950 576,10
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	92 642 770,46	393 800,68

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 16. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	831 574 978,36	806 559 354,26
PENDAPATAN ASLI DAERAH	29 323 369,73	27 813 379,28
Pajak Daerah	7 189 278,67	7 140 880,42
Retribusi Daerah	3 252 732,50	3 020 413,61
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	1 929 479,53
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18 881 358,55	15 722 605,72
DANA PERIMBANGAN	587 653 782,03	578 256 314,98
Bagi Hasil Pajak	7 821 527,64	8 492 555,43
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 439 401,34	7 769 061,44
Dana Alokasi Umum (DAU)	435 029 435,00	404 769 066,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	139 363 418,05	142 779 101,11
Dana Insentif Daerah	0,00	14 446 531,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	214 597 826,60	200 489 660,00
Pendapatan Hibah	24 512 160,00	24 737 150,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	69 068 458,50	55 972 413,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	121 008 708,10	119 755 097,00
Lainnya	8 500,00	25 000,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 16. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2020 - 2021

Jenis Pendapatan	(000 Rp)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	792 112 823,26	791 417 205,89
PENDAPATAN ASLI DAERAH	27 813 379,28	28 360 235,95
Pajak Daerah	7 140 880,42	9 431 317,36
Retribusi Daerah	3 020 413,61	934 137,38
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 929 479,53	2 901 458,89
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15 722 605,72	15 093 322,31
DANA PERIMBANGAN	563 809 783,98	557 757 654,47
Bagi Hasil Pajak	8 492 555,43	13 634 405,40
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 769 061,44	7 373 839,81
Dana Alokasi Umum (DAU)	404 769 066,00	401 447 632,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	142 779 101,11	135 301 777,26
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	200 489 660,00	205 299 315,47
Pendapatan Hibah	24 737 150,00	25 229 553,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	55 972 413,00	51 802 830,47
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	8 511 835,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	119 755 097,00	119 755 097,00
Lainnya	25 000,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 17. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	2 081 420 040,06	2 162 096 665,25
PENDAPATAN ASLI DAERAH	612 809 681,25	550 275 048,13
Pajak Daerah	373 764 303,00	398 448 008,99
Retribusi Daerah	28 256 993,00	29 579 486,07
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13 062 932,00	14 894 667,17
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	197 725 453,25	107 352 885,90
DANA PERIMBANGAN	1 408 084 148,00	1 364 968 467,08
Bagi Hasil Pajak	52 149 891,00	52 323 993,75
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	14 367 285,00	13 004 745,51
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 034 730 849,00	1 034 730 849,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	306 836 123,00	264 908 878,83
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	60 526 210,81	246 853 150,04
Pendapatan Hibah	4 500 000,00	90 008 850,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	48 526 210,81	156 844 300,04
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7 500 000,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 17. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	2 294 656 383,15	2 145 801 470,57
PENDAPATAN ASLI DAERAH	627 296 544,83	537 542 438,10
Pajak Daerah	480 420 824,00	410 455 262,27
Retribusi Daerah	29 626 488,62	25 725 636,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17 468 775,20	21 276 185,22
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	99 780 457,01	80 085 354,31
DANA PERIMBANGAN	1 400 623 202,26	1 320 383 923,53
Bagi Hasil Pajak	38 435 501,58	52 953 586,19
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 537 771,14	7 722 390,01
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 110 510 308,00	1 019 027 785,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	246 139 621,54	240 680 162,32
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	266 736 636,07	287 875 108,94
Pendapatan Hibah	93 454 680,00	114 415 128,16
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	164 118 621,07	132 571 863,79
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9 163 335,00	40 888 117,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 17. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2020 - 2021

Jenis Pendapatan	(000 Rp)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	2 145 801 470,57	2 127 749 572,15
PENDAPATAN ASLI DAERAH	537 542 438,10	564 289 613,75
Pajak Daerah	410 455 262,27	416 921 523,71
Retribusi Daerah	25 725 636,30	22 099 157,93
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21 276 185,22	22 972 960,18
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	80 085 354,31	102 295 971,94
DANA PERIMBANGAN	1 320 383 923,53	1 320 581 545,52
Bagi Hasil Pajak	52 953 586,19	72 348 413,43
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 722 390,01	7 401 438,28
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 019 027 785,00	1 002 082 183,35
Dana Alokasi Khusus (DAK)	240 680 162,32	238 749 510,46
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	287 875 108,94	242 878 412,88
Pendapatan Hibah	114 415 128,16	3 450 586,15
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	132 571 863,79	108 035 619,73
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	40 888 117,00	34 272 707,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lainnya	0,00	97 119 500,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2021

Tabel 18. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Metro, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	893 181 351,22	850 862 998,52
PENDAPATAN ASLI DAERAH	154 652 520,65	132 202 276,04
Pajak Daerah	18 209 276,44	21 731 062,46
Retribusi Daerah	6 108 016,99	5 604 727,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 902 898,39	4 342 620,32
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126 432 328,83	100 523 866,26
DANA PERIMBANGAN	680 266 516,20	624 067 025,41
Bagi Hasil Pajak	16 633 197,11	13 904 585,73
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	14 124 870,96	12 876 195,83
Dana Alokasi Umum (DAU)	453 830 037,00	455 732 157,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	195 678 411,13	141 554 086,86
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	58 262 314,36	94 593 697,07
Pendapatan Hibah	0,00	15 546 960,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	48 091 147,33	75 069 016,48
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7 500 000,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2 671 167,03	3 977 720,59

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 18. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Metro, 2019 - 2020

Jenis Pendapatan	(000 Rp)	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	927 116 733,84	917 969 390,32
PENDAPATAN ASLI DAERAH	176 199 324,17	221 649 607,05
Pajak Daerah	27 205 358,06	28 847 730,45
Retribusi Daerah	5 631 840,65	7 031 322,90
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 894 552,26	5 562 606,12
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	138 467 573,20	180 207 947,58
DANA PERIMBANGAN	641 899 006,68	571 987 988,65
Bagi Hasil Pajak	10 198 622,88	12 948 597,40
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 324 897,83	7 764 243,71
Dana Alokasi Umum (DAU)	476 738 335,00	435 052 452,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	149 637 150,96	116 222 695,55
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	109 018 403,00	124 331 794,62
Pendapatan Hibah	15 908 400,00	16 350 760,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	71 063 330,41	56 362 479,44
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20 768 002,00	49 532 667,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lainnya	1 278 670,58	2 085 888,18

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 18. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Metro, 2020 - 2021

Jenis Pendapatan	(000 Rp)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	917 969 390,32	938 645 387,43
PENDAPATAN ASLI DAERAH	221 649 607,05	273 845 048,14
Pajak Daerah	28 847 730,45	33 105 926,63
Retribusi Daerah	7 031 322,90	7 879 918,10
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 562 606,12	7 340 250,54
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	180 207 947,58	225 518 952,87
DANA PERIMBANGAN	571 987 988,65	551 540 000,91
Bagi Hasil Pajak	12 948 597,40	17 964 480,60
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 764 243,71	7 431 070,44
Dana Alokasi Umum (DAU)	435 052 452,00	427 590 058,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	116 222 695,55	98 554 391,87
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	124 331 794,62	113 260 338,38
Pendapatan Hibah	16 350 760,00	267 485,12
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	56 362 479,44	52 491 118,85
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	49 532 667,00	40 105 386,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lainnya	2 085 888,18	20 396 348,41

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 19. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
2017-2018**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	21 211 061 083,11	21 763 769 643,82
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 946 514 939,90	1 755 317 338,90
Pajak Daerah	720 762 749,94	804 624 549,81
Retribusi Daerah	70 353 385,90	82 320 783,92
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	55 087 358,31	63 284 187,04
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1 100 311 445,75	805 087 818,13
DANA PERIMBANGAN	15 232 247 423,16	15 401 585 464,78
Bagi Hasil Pajak	488 595 449,91	315 900 091,02
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	136 668 714,12	232 688 790,29
Dana Alokasi Umum (DAU)	10 976 220 521,00	11 092 837 679,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	3 663 364 014,16	3 760 158 904,47
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4 032 298 720,05	4 606 866 840,14
Pendapatan Hibah	313 044 813,43	905 984 781,44
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	1 071 546 027,51	2 185 859 411,97
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1 608 419 071,04	61 250 000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4 000 000,00	11 000 000,00
Dana Desa	0,00	831 275 685,49
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1 035 288 808,08	738 739 086,24

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 19. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
2019 – 2020**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	22 542 810 802,07	20 960 763 048,17
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2 061 454 861,23	2 046 785 209,65
Pajak Daerah	971 504 417,08	931 542 703,32
Retribusi Daerah	97 686 179,78	106 200 529,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	72 862 680,80	82 400 517,67
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	919 401 583,58	926 641 459,37
DANA PERIMBANGAN	15 344 949 788,71	14 185 654 988,95
Bagi Hasil Pajak	249 020 128,80	272 616 370,53
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	128 147 785,67	142 728 526,83
Dana Alokasi Umum (DAU)	11 477 888 137,00	10 437 454 423,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	3 489 893 737,24	3 310 754 478,59
Dana Insentif Desa	0,00	22 101 190,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5 136 406 152,14	4 728 322 849,57
Pendapatan Hibah	1 073 976 696,52	1 065 585 026,98
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	1 465 984 813,31	1 157 639 246,20
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1 694 422 701,99	1 369 649 022,69
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3 235 000,00	68 893 100,53
Dana Desa	570 229 557,08	916 862 132,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	328 557 383,25	457 861 877,22

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 19. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
2020 - 2021**

Jenis Pendapatan	(000 Rp)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	20 960 763 048,17	21 479 522 646,66
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2 046 785 209,65	2 302 890 905,71
Pajak Daerah	931 542 703,32	975 618 200,98
Retribusi Daerah	106 200 529,30	87 370 096,31
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	82 400 517,67	95 779 681,53
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	926 641 459,37	1 144 122 926,89
DANA PERIMBANGAN	14 185 654 988,95	14 341 289 314,12
Bagi Hasil Pajak	272 616 370,53	493 163 271,54
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	142 728 526,83	160 595 471,37
Dana Alokasi Umum (DAU)	10 437 454 423,00	10 288 959 444,42
Dana Alokasi Khusus (DAK)	3 310 754 478,59	3 398 571 126,79
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4 728 322 849,57	4 835 342 426,84
Pendapatan Hibah	1 065 585 026,98	401 246 590,22
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	1 157 639 246,20	1 101 501 887,31
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1 369 649 022,69	259 000 410,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	68 893 100,53	0,00
Dana Desa	916 862 132,00	2 440 291 047,41
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	457 861 877,22	633 302 491,89

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	6 813 755 009,49	7 098 983 642,60
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2 750 596 478,33	2 864 235 753,08
Pajak Daerah	2 451 408 220,07	2 577 739 717,94
Retribusi Daerah	7 322 619,00	7 844 961,89
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27 522 159,55	27 771 046,31
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	264 343 479,70	250 880 026,93
DANA PERIMBANGAN	2 643 744 659,46	2 816 327 377,99
Bagi Hasil Pajak	249 340 043,38	122 496 301,79
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	93 544 761,46
Dana Alokasi Umum (DAU)	144 778 671,12	1 854 701 094,16
Dana Alokasi Khusus (DAK)	104 561 372,26	745 585 220,58
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1 851 595 354,00	1 418 420 511,53
Pendapatan Hibah	542 809 262,08	11 870 119,34
Dana Darurat	1 419 413 871,70	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	10 374 402,20	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7 500 000,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	16 765 434,40	15 719 965,29
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain	1 384 774 035,10	1 390 830 426,90

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	7 266 993 438,83	7 019 492 008,74
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3 018 067 291,16	2 841 617 005,68
Pajak Daerah	2 627 888 230,39	2 386 345 268,30
Retribusi Daerah	11 069 477,87	15 176 408,10
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27 837 905,35	29 873 630,62
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	351 271 677,55	410 221 698,65
DANA PERIMBANGAN	2 627 195 349,11	2 461 886 209,96
Bagi Hasil Pajak	87 416 096,82	123 204 760,04
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	51 128 238,60	34 589 203,09
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 906 780 297,00	1 732 551 921,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	581 870 716,69	571 540 325,83
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1 621 730 798,56	1 715 988 793,10
Pendapatan Hibah	11 362 590,00	8 835 549,70
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26 756 363,00	46 434 098,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	17 746 958,78	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain	1 565 864 886,78	1 660 719 145,40

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung, 2020 - 2021

Jenis Pendapatan	(000 Rp)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	7 019 492 008,74	7 469 469 346,03
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2 841 617 005,68	3 249 669 847,27
Pajak Daerah	2 386 345 268,30	2 721 138 045,70
Retribusi Daerah	15 176 408,10	14 664 096,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29 873 630,62	33 335 927,75
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	410 221 698,65	480 531 777,81
DANA PERIMBANGAN	2 461 886 209,96	4 184 392 483,01
Bagi Hasil Pajak	123 204 760,04	225 542 358,27
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	34 589 203,09	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 732 551 921,00	1 726 296 248,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	571 540 325,83	2 232 553 876,74
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1 715 988 793,10	35 407 015,76
Pendapatan Hibah	8 835 549,70	10 565 423,81
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	46 434 098,00	17 389 748,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	7 374 451,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain	1 660 719 145,40	77 392,95

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2021

Lampiran 2 Data Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2017-2021



Output Tabel Dinamis

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					
	2021	2020	2019	2018	2017	
Lampung Barat	2.83	2.13	1.66	2.74	0.96	
Tanggamus	2.93	2.96	2.96	2.21	5.08	
Lampung Selatan	5.27	5.19	4.68	4.49	4.80	
Lampung Timur	3.05	2.64	2.87	3.80	3.89	
Lampung Tengah	4.31	4.22	2.61	2.51	3.08	
Lampung Utara	6.14	5.34	5.11	4.83	5.62	
Way Kanan	3.36	3.56	3.59	4.42	2.88	
Tulang Bawang	4.10	4.84	4.01	3.52	3.47	
Pesawaran	4.19	4.64	4.41	4.63	5.73	
Pringsewu	4.85	5.77	4.92	4.13	4.63	
Mesuji	3.42	3.71	3.61	3.76	0.65	
Tulang Bawang Barat	3.35	3.46	3.57	2.95	1.86	
Pesisir Barat	3.08	3.41	3.25	1.87	2.71	
Bandar Lampung	8.85	8.79	7.15	7.27	8.10	
Metro	5	5.40	5.12	5.79	4.64	
Provinsi Lampung	4.69	4.67	4.03	4.04	4.33	

Sumber: BPS Provinsi Lampung

S

Lampiran 3 Data PDRB Kabupaten dan kota Provinsi Lampung tahun 2017-2021



Output Tabel Dinamis

Wilayah	PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Rupiah)				
	2021	2020	2019	2018	2017
Lampung Barat	16 691 464	16 311 641	16 439 504	15 767 211	15 117 157
Tanggamus	16 916 481	16 723 989	18 154 634	17 470 686	16 805 729
Lampung Selatan	28 497 195	28 005 367	29 891 130	28 732 183	27 558 977
Lampung Timur	25 936 870	26 111 509	28 313 977	27 539 249	26 774 727
Lampung Tengah	32 970 220	32 552 298	37 296 029	35 748 301	34 171 318
Lampung Utara	26 379 819	25 705 376	26 735 172	25 501 106	24 314 176
Way Kanan	20 417 471	20 022 703	21 242 821	20 410 044	19 583 312
Tulang Bawang	37 300 970	36 317 711	35 041 182	33 699 755	32 330 700
Pesawaran	23 857 801	23 645 335	25 630 113	24 679 039	23 718 194
Pringsewu	19 345 420	18 877 941	19 325 698	18 558 210	17 818 432
Mesuji	30 932 026	30 470 823	34 954 161	33 419 076	31 907 614
Tulang Bawang Barat	27 704 508	27 115 559	28 712 977	27 524 491	26 296 663
Pesisir Barat	19 146 727	18 899 297	20 042 907	19 159 038	18 330 637
Bandar Lampung	33 603 217	33 305 748	37 387 261	35 876 747	34 374 182
Metro	25 670 636	25 156 671	25 709 051	24 727 590	23 715 212
Provinsi Lampung	27 197 459	26 743 751	28 894 502	27 741 245	26 614 816

Sumber: BPS Provinsi Lampung,

Lampiran 4 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FE

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	76.533941	(14,58)	0.0000
Cross-section Chi-square	222.679901	14	0.0000

Sumber: EViews 10, diolah 2022

Lampiran 5 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RE

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.062050	2	0.9695

*Sumber: EViews 10, diolah 2022*Lampiran 6 Hasil Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	131.1962 (0.0000)	0.772626 (0.3794)	131.9688 (0.0000)

Sumber: EViews 10, diolah 2022

Lampiran 7 Uji t

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 12/13/22 Time: 12:22

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 75

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	32463710	2978224.	10.90036	0.0000
PAD	0.030627	0.009192	3.332107	0.0014
TPT	218288.0	374356.9	0.583101	0.5616

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	9101306.	0.9464
Idiosyncratic random	2166676.	0.0536

Weighted Statistics

Root MSE	2094135.	R-squared	0.149683
Mean dependent var	3965941.	Adjusted R-squared	0.126063
S.D. dependent var	2286278.	S.E. of regression	2137318.
Sum squared resid	3.29E+14	F-statistic	6.337135
Durbin-Watson stat	1.390950	Prob(F-statistic)	0.002917

Unweighted Statistics

R-squared	0.248912	Mean dependent var	37461785
Sum squared resid	5.32E+15	Durbin-Watson stat	0.086005

Sumber: EViews 10, diolah 2022

Lampiran 8 Uji F

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 12/13/22 Time: 12:22

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 75

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	32463710	2978224.	10.90036	0.0000
PAD	0.030627	0.009192	3.332107	0.0014
TPT	218288.0	374356.9	0.583101	0.5616

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	9101306.	0.9464
Idiosyncratic random	2166676.	0.0536

Weighted Statistics

Root MSE	2094135.	R-squared	0.149683
Mean dependent var	3965941.	Adjusted R-squared	0.126063
S.D. dependent var	2286278.	S.E. of regression	2137318.
Sum squared resid	3.29E+14	F-statistic	6.337135
Durbin-Watson stat	1.390950	Prob(F-statistic)	0.002917

Unweighted Statistics

R-squared	0.248912	Mean dependent var	37461785
Sum squared resid	5.32E+15	Durbin-Watson stat	0.086005

Sumber: Eviews 10, diolah 2022

Lampiran 9 Uji Koefisien Determinasi

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 12/13/22 Time: 12:22

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 75

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	32463710	2978224.	10.90036	0.0000
PAD	0.030627	0.009192	3.332107	0.0014
TPT	218288.0	374356.9	0.583101	0.5616
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			9101306.	0.9464
Idiosyncratic random			2166676.	0.0536
Weighted Statistics				
Root MSE	2094135.	R-squared		0.149683
Mean dependent var	3965941.	Adjusted R-squared		0.126063
S.D. dependent var	2286278.	S.E. of regression		2137318.
Sum squared resid	3.29E+14	F-statistic		6.337135
Durbin-Watson stat	1.390950	Prob(F-statistic)		0.002917
Unweighted Statistics				
R-squared	0.248912	Mean dependent var		37461785
Sum squared resid	5.32E+15	Durbin-Watson stat		0.086005

Sumber: Eviews 10, diolah 2022

Lampiran 10 Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmín, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 70 99 / Un.16 / P1 / KT / II / 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

PENGARUHPENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2021 MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
YAKUB KUNCARA	1851010376	FEBI/ ES

Bebas plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 12 % dan dinyatakan *Lulus* dengan bukti terlampir dan dinyatakan *Lulus* dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 03 Februari 2023
 Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

PENGARUHPENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2017-2021 MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

ORIGINALITY REPORT

12 %	11 %	4 %	4 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3 %
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3 %
3	www.lampost.co Internet Source	1 %
4	jurnal.ubl.ac.id Internet Source	<1 %
5	lampungselatankab.bps.go.id Internet Source	<1 %
6	jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id Internet Source	<1 %
7	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
8	ojs.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
9	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung	<1 %

Student Paper

10	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	<1 %
11	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
12	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
13	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
14	www.semanticscholar.org Internet Source	<1 %
15	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
17	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
18	journal.unpak.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
20	Keti Purnamasari. "Analisi Regresi Data Panel pada Kinerja Perbankan di Indonesia", Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 2020 Publication	<1 %

21	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	<1 %
22	Ibnu Agung Permana, Asep M. Ramdan, Faizal Mulia Z. "Kekuatan Keunikan Produk dan Word Of Mouth terhadap Keputusan Pembelian", <i>Journal of Management and Bussines (JOMB)</i> , 2019 Publication	<1 %
23	Mufrida Zein, Eni Suasri. "ANALISIS TREND PERKEMBANGAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014-2018", <i>Jurnal Riset Akuntansi Politala</i> , 2022 Publication	<1 %
24	Ririt Iriani Sri Setiawati. "ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL KINERJA BANK DAN MAKRO EKONOMI TERHADAP STABILITAS PERBANKAN DI INDONESIA", <i>Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia</i> , 2020 Publication	<1 %
25	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
26	docplayer.info Internet Source	<1 %
27	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
28	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %

		<1 %
29	123dok.com Internet Source	<1 %
30	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
31	id.123dok.com Internet Source	<1 %
32	jurnal.dharmawangsa.ac.id Internet Source	<1 %
33	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
34	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
35	www.scribd.com Internet Source	<1 %
36	Lisa Marini, Novi Tri Putri. "PELUANG TERJADINYA PENGANGGURAN DI PROVINSI BENGKULU : SEBERAPA BESAR?", <i>Convergence: The Journal of Economic Development</i> , 2020 Publication	<1 %
37	Helina Helmy, Muhammad Totong Kamaluddin, Iskhaq Iskandar, Suheryanto. "Investigating Spatial Patterns of Pulmonary Tuberculosis and Main Related Factors in Bandar Lampung, Indonesia Using	<1 %

Geographically Weighted Poisson
Regression", Tropical Medicine and
Infectious Disease, 2022

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On